

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BELU



Evaluasi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Belu Tahun 2005-2025

**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH (BP4D)**

Oktober 2023

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	i
DAFTAR TABEL DAN GRAFIK	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Dasar Hukum.....	4
1.3. Tujuan	5
 BAB II CAPAIAN KINERJA RPJPD PADA AKHIR PERIODE	 6
2.1. Analisis Capaian Sasaran Pokok Indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	 9
2.2. Analisis Capaian Sasaran Pokok Indikator Angka Harapan Hidup	12
2.3. Analisis Capaian Sasaran Pokok Indikator Pertumbuhan Ekonomi Daerah	 13
2.4. Analisis Capaian Sasaran Pokok Indikator Pendapatan Perkapita Atas Dasar Harga Konstan.....	 16
2.5. Analisis Capaian Sasaran Pokok Indikator Angka Kemiskinan	19
2.6. Analisis Capaian Sasaran Pokok Indikator Tingkat Pengangguran Terbuka.....	 21
2.7. Analisis Capaian Sasaran Pokok Indikator Angka Prevalensi Kekurangan Gizi	 23
2.8. Analisis Capaian Sasaran Pokok Indikator Kejadian Kematian Bayi (KKB)	 24
2.9. Analisis Capaian Sasaran Pokok Indikator Kejadian Kematian Ibu (KKI)	 25

BAB III FAKTOR PENDORONG DAN PENGHAMBAT PENCAPAIAN

KINERJA.....	27
3.1. Faktor Pendorong Pencapaian Kinerja.....	27
3.1.1. Analisis Faktor Pendorong Pencapaian Kinerja Indikator Indeks Pembangunan Manusia	27
3.1.2. Analisis Faktor Pendorong Pendapatan Perkapita Atas Dasar Harga Konstan.....	30
3.1.3. Analisis Faktor Pendorong Angka Kemiskinan	33
3.1.4. Analisis Faktor Pendorong Kinerja Indikator Angka Harapan Hidup (AHH)	38
3.2. Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja.....	43
3.2.1. Analisis Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja Indikator Angka Harapan Hidup.....	43
3.2.2. Analisis Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja Indikator Pertumbuhan Ekonomi Daerah.....	51
3.2.3. Analisis Faktor Penghambat Capaian Indikator Pendapatan Perkapita Atas Dasar Harga Konstan	55
3.2.4. Analisis Faktor Penghambat Capaian Indikator Angka Kemiskinan	57
3.2.5. Analisis Faktor Penghambat Capaian Indikator Tingkat Pengangguran Terbuka.....	59
 BAB IV KESIMPULAN DAN REKOMENDASI TINDAK LANJUT	 62
4.1. Kesimpulan	62
4.2. Rekomendasi Tindak Lanjut	65

DAFTAR TABEL DAN GRAFIK

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Evaluasi terhadap Hasil RPJPD Kabupaten Belu.....	7
Tabel 2.2. Capaian Indikator Kinerja Makro Pembangunan Kabupaten Belu Tahun 2005-2022	9
Tabel 3.1. Perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM) SD sampai SMP Di Kabupaten Belu Tahun 2017-2022	29
Tabel 3.2. Jumlah Sekolah, PAUD dan Tenaga Pendidik Kabupaten Belu Tahun 2022	29
Tabel 3.3. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Belu Tahun 2018-2022	31
Tabel 3.4. Pertumbuhan PDRB ADHK Pada Dua Periode Akhir RPJPD Kabupaten Belu	32
Tabel 3.5. Realisasi APBD Bidang Kesehatan Kabupaten Belu Tahun 2020-2022	40
Tabel 3.6. Pertumbuhan APM dan APK Setiap Jenjang Pendidikan Di Kabupaten Belu Tahun 2020-2022	41
Tabel 3.7. Pertumbuhan PDRB ADHK Kabupaten Belu Tahun 2018-2022	42
Tabel 3.8. Perkembangan Angka Kemiskinan dan Pendapatan Perkapita Kabupaten Belu Per Periode RPJPD Tahun 2005-2025.....	43
Tabel 3.9. Jumlah Fasilitas Kesehatan Di Kabupaten Belu Tahun 2023	46
Tabel 3.10. Persentase Gizi Buruk Balita Di Kabupaten Belu Tahun 2018-2022	49
Tabel 3.11. Capaian Indikator Lingkungan Hidup di Kabupaten Belu Tahun 2016-2022	51

Tabel 3.12. Laju Pertumbuhan Produk Domestik Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Kabupaten Belu Menurut Lapangan Usaha (persen) Tahun 2018-2022	53
Tabel 3.13. Pertumbuhan PRDB ADHK pada Dua Periode akhir RPJPD Kabupaten Belu	56
Tabel 3.14. Garis Kemiskinan Kabupaten Belu Tahun 2014-2022 Menurut Standar Bank Dunia.....	58

DAFTAR GRAFIK

Grafik 2.1. Pertumbuhan IPM Periode RPJPD 2005-2025	10
Grafik 2.2. Pertumbuhan Usia Harapan Hidup Periode RPJPD Tahun 2005-2025	12
Grafik 2.3. Pertumbuhan Ekonomi Periode RPJPD Tahun 2005-2025	14
Grafik 2.4. Pertumbuhan Pendapatan Perkapita Periode RPJPD Tahun 2005-2025	17
Grafik 2.5. Pertumbuhan Tingkat Kemiskinan Periode RPJPD Tahun 2005-2025	20
Grafik 2.6. Pertumbuhan Tingkat Pengangguran Terbuka Periode RPJPD Tahun 2005-2025.....	22
Grafik 3.1. Persentase Gizi Buruk Balita di Kabupaten Belu Tahun 2018-2022	50

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Rencana pembangunan jangka panjang daerah atau yang lazim disebut RPJPD merupakan dokumen perencanaan daerah yang disusun untuk pelaksanaan pembangunan daerah selama 20 tahun. RPJPD memberikan gambaran proses perencanaan pembangunan daerah secara periodik yakni proses penyusunan tahapan-tahapan pencapaian sasaran pembangunan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/Daerah dalam jangka waktu tersebut. Dengan adanya RPJPD maka daerah berupaya memanfaatkan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, antara lain dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, aspek daya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia dalam jangka waktu 20 tahun.

Sebagai salah satu kabupaten di wilayah provinsi Nusa Tenggara Timur sekaligus sebagai kabupaten yang berbatasan darat langsung dengan Negara Timor Leste, Kabupaten Belu memiliki dokumen RPJPD atas dasar peraturan daerah Kabupaten Belu Nomor 4 tahun 2016 tentang perubahan atas peraturan daerah nomor 3 tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Belu Tahun 2005-2025. Hingga saat ini di tahun 2023, Kabupaten Belu telah melaksanakan RPJPD selama 22 tahun lamanya dan telah melewati proses pembangunan daerah yang panjang melalui periode kepemimpinan kepala daerah serta periode rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) sebanyak 4 periode.

Setiap 20 Tahun di lakukan evaluasi RPJPD guna mengukur sejauh mana pencapaian yang diperoleh beserta faktor - faktor yang berpengaruh dalam setiap tahapan proses RPJPD. Berbagai kebijakan, strategi, program dan

kegiatan telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Belu dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial bagi seluruh masyarakat Kabupaten Belu yang tersebar dan mendiami 12 kecamatan ini. Melalui visi pembangunan jangka panjang Kabupaten Belu 2005-2025 yakni *“Belu Sebagai Kabupaten Perbatasan Yang Maju, Mandiri, Adil dan Sejahtera 2025”* sebagaijabaran dari tujuan nasional yakni masyarakat adil dan makmur material dan spiritual serta melalui landasan misi dan arah kebijakan pembangunan secara periodik telah menghantarkan Kabupaten Belu pada perubahan yang baik hingga saat ini. Semenjak periode RPJMD pertama hingga di penghujung akhir periode RPJPD tepatnya periode RPJMD keempat tahun 2020-2024, situasi perkembangan pembangunan di wilayah Kabupaten Belu cenderung membaik secara fluktuatif.

Pembangunan daerah cenderung membaik secara fluktuatif ini dipengaruhi oleh faktor eksternal maupun internal pemerintah daerah. Faktor eksternal meliputi kebijakan pembangunan nasional dari berbagai kementerian/lembaga, eksistensi regulasi, intervensi pembangunan atas dasar kolaborasi program pembangunan daerah antara pemerintah daerah Kabupaten Belu dengan berbagai lembaga non pemerintah (NGO) dari dalam negeri maupun luar negeri. Adanya fenomena dan peristiwa-peristiwa gejala demografi, sosial dan geografis yang turut mempengaruhi proses pembangunan daerah. Sementara faktor internal yang mempengaruhi kinerja pemerintah daerah Kabupaten Belu antara lain meliputi eksistensi kebijakan pembangunan daerah terhadap semua sektor pembangunan, konsistensi antara perencanaan daerah dengan arah kebijakan pembangunan daerah tahunan serta status kesiapan fiskal daerah dalam menjawab kebutuhan program pembangunan daerah serta problematika sosial kemasyarakatan dan geografis daerah yang kurang kondusif.

Dalam suatu sistem perencanaan daerah, pengendalian dan evaluasi merupakan salah satu bagian terpenting setelah proses perencanaan dan pelaksanaan. Secara umum hal ini bertujuan untuk mengukur capaian dan keberhasilan proses perencanaan dan pelaksanaan rencana. Perencanaan

daerah yang baik, tidak selalu memberikan hasil yang baik. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa hal, salah satunya proses pelaksanaan yang baik dan konsisten dengan perencanaan. Pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah merupakan salah satu upaya untuk menyelaraskan perencanaan pembangunan dan pelaksanaannya. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dalam Bab IV menjabarkan bahwa pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah bertujuan untuk mewujudkan konsistensi antara kebijakan dengan pelaksanaan dan hasil rencana pembangunan daerah. Pengendalian dan evaluasi pembangunan pada dasarnya bertujuan untuk mewujudkan konsistensi antara kebijakan dengan pelaksanaan dan hasil program daerah dari seluruh aspek demi menjamin pencapaian kesejahteraan masyarakat. Pengendalian dan evaluasi juga bertujuan untuk memberikan informasi dan justifikasi atas rencana, implementasi, dan hasil perencanaan yang telah dilakukan. Informasi tersebut dapat menjadi umpan balik dan pertimbangan bagi pemerintah dalam perumusan dokumen perencanaan selanjutnya.

Substansi evaluasi pelaksanaan RPJPD adalah

1. Evaluasi terhadap hasil RPJPD mencakup sasaran pokok, arah kebijakan dan penahapan untuk mencapai misi dan mewujudkan visi pembangunan jangka panjang Daerah yang digunakan untuk mengetahui:
 - a. realisasi antara sasaran pokok RPJPD kabupaten dengan capaian sasaran RPJMD kabupaten; dan
 - b. realisasi antara capaian sasaran pokok RPJPD kabupaten dengan arah kebijakan pembangunan jangka panjang nasional;
2. Evaluasi dilakukan untuk memastikan bahwa visi, misi dan sasaran pokok, arah kebijakan pembangunan jangka panjang Daerah kabupaten

dapat dicapai, untuk mewujudkan visi pembangunan jangka panjang nasional.

Dengan demikian evaluasi terhadap RPJPD Kabupaten Belu tahun 2005-2025 harus dilakukan karena merupakan kegiatan evaluasi untuk menilai pencapaian sasaran pembangunan nasional di daerah serta menganalisis permasalahan dan faktor keberhasilan dalam proses pelaksanaan pembangunan sehingga menjadi rujukan penting bagi perbaikan kebijakan pembangunan daerah pada tahapan berikutnya.

1.2. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I, Bali, Nusa Tenggara Barat Dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 3 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Belu Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Belu Tahun 2009 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belu Nomor 68) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 3 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Belu 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Belu Tahun 2016 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belu Nomor 102);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312).

1.3. TUJUAN

Tujuan dilakukannya evaluasi pelaksanaan RPJPD Kabupaten Belu Tahun 2005-2025 ini adalah:

1. Untuk mengetahui capaian hasil indikator makro pembangunan atas dasar visi dan misi daerah selama 4 periode pembangunan lima tahunan;
2. Hasil evaluasi dijadikan sebagai gambaran dan acuan penting dalam perumusan pembangunan daerah setelah masa RPJPD Tahun 2005-2025 selesai.

BAB II

CAPAIAN KINERJA RPJPD PADA AKHIR PERIODE

Visi pembangunan daerah Kabupaten Belu dalam jangka panjang periode 2005-2025 yang ingin diwujudkan adalah terwujudnya *“Belu Sebagai Kabupaten Perbatasan Yang Maju, Mandiri, Adil dan Sejahtera 2025”*. Visi tersebut dicapai melalui beberapa misi yaitu pertama, mewujudkan masyarakat Belu yang berakhlak mulia, bermoral, beretika dan berbudaya berdasarkan falsafah Pancasila, kedua mewujudkan masyarakat Belu yang berkualitas dan berdaya saing, ketiga mewujudkan perekonomian daerah yang kokoh, keempat mewujudkan masyarakat Belu yang demokratis berlandaskan hukum, kelima mewujudkan aparatur pemerintah yang berkualitas, bersih dan berwibawa, keenam mewujudkan kabupaten Belu sebagai wilayah berkesinambungan lingkungan yang berwawasan tata ruang dan yang ketujuh, mewujudkan Kabupaten Belu sebagai wilayah perbatasan yang aman, nyaman, produktif dan berkembang.

Dalam mewujudkan visi dan misi daerah dalam RPJPD tersebut, pemerintah daerah Kabupaten Belu menetapkan Sembilan sasaran pokok yakni: meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM), meningkatnya pertumbuhan ekonomi, meningkatnya pendapatan perkapita atas dasar harga konstan, menurunnya angka kemiskinan, angka harapan hidup, menurunnya tingkat pengangguran terbuka, angka prevalensi kekurangan gizi, kejadian kematian bayi (KKB) dan Kejadian Kematian Ibu (KKI). Pemerintah Kabupaten Belu telah melakukan berbagai upaya strategis melalui arah kebijakan pembangunan yang diwujudkan dalam berbagai ragam program dan kegiatan selama 18 tahun sejak tahun perencanaan awal tahun 2005 dalam rangka mewujudkan visi dan misi RPJPD sebagaimana yang telah ditetapkan.

Hasil pencapaian visi dan misi RPJPD Kabupaten Belu tahun 2005-2025 selama kurun waktu kurang/lebih 18 tahun ini secara umum mengalami pencapaian yang baik walaupun belum maksimal ke titik capaian tertinggi 100%.

Tabel. 2.1 Evaluasi terhadap Hasil RPJPD Kabupaten Belu
Visi Daerah: Belu Sebagai Kabupaten Perbatasan Yang Maju, Mandiri, Adil dan Sejahtera 2025
Periode Pelaksanaan: Tahun 2005 - Tahun 2025

Misi Daerah	Sasaran Pokok	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan (2005)	Target Capaian pada Akhir Tahun Perencanaan	Target Sasaran Pokok RPJPD Kabupaten Belu				Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten Belu terhadap Sasaran Pokok RPJPD Kabupaten Belu				Tingkat Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten Belu terhadap Sasaran Pokok RPJPD Kabupaten Belu (%)			
				2005-2009	2010-2014	2015-2019	2020-2025	2005-2009	2010-2014	2015-2019	2020-2025	2005-2009	2010-2014	2015-2019	2020-2025
Misi 1. Mewujudkan Masyarakat Belu Yang Berakhlak Mulia, Bermoral, Beretika dan Berbudaya Berdasarkan Falsafah Pancasila	Meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	61.22	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) meningkat menjadi 71,90% pada tahun 2024	60.15	68.35	65.54	71.90	63.91	59.72	62.54	63.23	100	87.37	95.42	87.94
Misi 2. Mewujudkan Masyarakat Belu yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	61.22	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) meningkat menjadi 71,90% pada tahun 2024	60.15	68.35	65.54	71.90	63.91	59.72	62.54	63.23	100	87.37	95.42	87.94
		64.30	Angka Harapan Hidup meningkat menjadi 70,69% pada tahun 2024			68.30	70.69	62	62.31	64.89	65.28			95.01	92.35
	Angka prevalensi kekurangan Gizi			40,4%	20%					16.8	20,98				
	Kejadian Kematian Bayi (KKB)			38 Kejadian	10 Kejadian					80 kejadian	48 kejadian				
	Kejadian Kematian Ibu (KKI)			10 Kejadian	4 Kejadian					5 kejadian	6 kejadian				
Misi 3. Mewujudkan Perekonomian Daerah Yang Kokoh	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi	4.99	Laju Pertumbuhan Ekonomi Daerah meningkat menjadi 7,77% pada tahun 2024	5.36	6.28	6.73	7.77	4.74	5.74	5.38	3.19	88.43	91.40	79.94	41.06
	Meningkatnya Pendapatan Perkapita atas dasar harga konstan	2,191,031	Pendapatan Perkapita atas dasar harga konstan meningkat menjadi Rp. 25.186.756 pada tahun 2024	1,858,093	2,340,378	18,584,896	25,186,756	4,112,875	11,193,571	13,080,398	13,892,763	100	100	70.38	55.16
	Menurunnya Angka kemiskinan	47.88%	Penduduk Miskin menurun menjadi 9,13% pada tahun 2024	21.02	16.02	11.29	9.13	17.47	14.24	15.54	14.84	83.11	88.89	-37.64	-62.54
	Menurunnya Tingkat Pengangguran Terbuka	5.4	Pengangguran Terbuka menurun menjadi 1,81% pada tahun 2024			2.43	1.81	3,10	2.94	4.63	6.00			-90.63	-231.49

Misi Daerah	Sasaran Pokok	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan (2005)	Target Capaian pada Akhir Tahun Perencanaan	Target Sasaran Pokok RPJPD Kabupaten Belu				Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten Belu terhadap Sasaran Pokok RPJPD Kabupaten Belu				Tingkat Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten Belu terhadap Sasaran Pokok RPJPD Kabupaten Belu (%)			
				2005-2009	2010-2014	2015-2019	2020-2025	2005-2009	2010-2014	2015-2019	2020-2025	2005-2009	2010-2014	2015-2019	2020-2025
Misi 4. Mewujudkan Masyarakat Belu yang Demokratis Berlandaskan Hukum	Meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	61.22	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) meningkat menjadi 71,90% pada tahun 2024	60.15	68.35	65.54	71.90	63.91	59.72	62.54	63.23	100	87.37	95.42	87.94
Misi 5. Mewujudkan Aparatur Pemerintah yang Berkualitas, Bersih dan Berwibawa	Meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	61.22	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) meningkat menjadi 71,90% pada tahun 2024	60.15	68.35	65.54	71.90	63.91	59.72	62.54	63.23	100	87.37	95.42	87.94
Misi 6. Mewujudkan Kabupaten Belu Sebagai Wilayah Berkeseimbangan Lingkungan yang Berwawasan Tata Ruang	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi	4.99	Laju Pertumbuhan Ekonomi Daerah meningkat menjadi 7,77% pada tahun 2024	5.36	6.28	6.73	7.77	4.74	5.74	5.38	3.19	88.43	91.40	79.94	41.06
	Meningkatnya Pendapatan Perkapita atas dasar harga konstan	2,191,031	Pendapatan Perkapita atas dasar harga konstan meningkat menjadi Rp. 25.186.756 pada tahun 2024	1,858,093	2,340,378	18,584,896	25,186,756	4,112,875	11,193,571	13,080,398	13,892,763	100	100	70.38	55.16
Misi 7. Mewujudkan Kabupaten Belu Sebagai Wilayah Perbatasan yang Aman, Nyaman, Produktif dan Berkembang	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi	4.99	Laju Pertumbuhan Ekonomi Daerah meningkat menjadi 7,77% pada tahun 2024	5.36	6.28	6.73	7.77	4.74	5.74	5.38	3.19	88.43	91.40	79.94	41.06
	Meningkatnya Pendapatan Perkapita atas dasar harga konstan	2,191,031	Pendapatan Perkapita atas dasar harga konstan meningkat menjadi Rp. 25.186.756 pada tahun 2024	1,858,093	2,340,378	18,584,896	25,186,756	4,112,875	11,193,571	13,080,398	13,892,763	100	100	70.38	55.16

Disusun
Tanggal, 23 Oktober 2023

Kepala BP4D Kabupaten Belu,

Rine Bere Baria, ST
Pembina Tk.I

NIP.19730902 200112 1 005

Disetujui
Tanggal, 30 Oktober 2023

Bupati Belu,

dr. Agustinus Taolin, Sp.PD-KGEH, FINASIM

Tabel 2.2. Capaian Indikator Kinerja Makro Pembangunan Kabupaten Belu Tahun 2005-2022

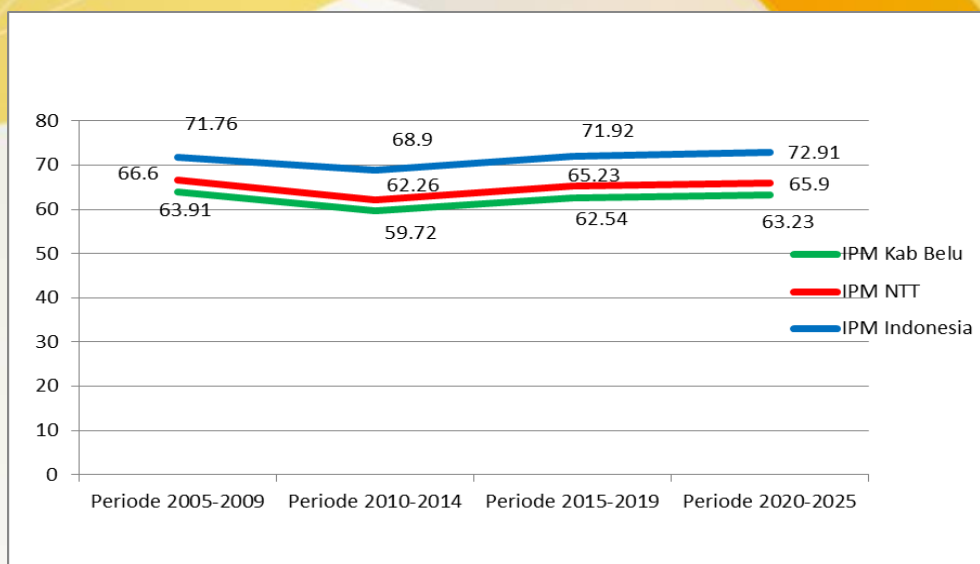
No	Indikator Kinerja Makro	Capaian Kinerja Awal Periode Perencanaan (2005)	Capaian Pada Tahun 2022	Pertumbuhan/ Penurunan	Keterangan
1	Meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	61.22	63.23	2.01	Pencapaian meningkat
2	Angka Harapan Hidup (Usia)	64.30	65.28	0.98	Pencapaian meningkat
3	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi (%)	4.99	3.19	-1.80	Pencapaian menurun
4	Meningkatnya Pendapatan Perkapita atas dasar harga konstan (Rupiah)	2,191,031	13,892,763	11,701,732	Pencapaian meningkat
5	Menurunnya Angka kemiskinan (%)	47.88	14.84	-33.04	Pencapaian meningkat
6	Menurunnya Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	5.4	6.00	0.60	Pencapaian menurun

Sumber: Data Olahan BPS.Belu.

2.1. Analisis Capaian Sasaran Pokok Indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Kondisi IPM Kabupaten Belu pada awal tahun perencanaan yakni tahun 2005 berada pada posisi 61,22. Terhadap kondisi tersebut pada target pencapaian RPJPD di tahun 2025, pemerintah Kabupaten Belu menargetkan 71,90. Atas upaya yang dilakukan terhadap fokus pencapaian indikator IPM melalui arah kebijakan pembangunan diperoleh pencapaian target IPM pada angka 63,91, dimana pada periode RPJMD 2005-2009 bertambah 3,76 poin dari target 60,15 di tahun 2009.

Grafik 2.1. Pertumbuhan IPM Periode RPJPD 2005-2025



Sumber: BPS.Belu

Pada tahapan periode kedua RPJPD yakni tahun 2010-2014 capaian IPM berada pada posisi 59,72 menurun 4,19 poin dari capaian tahun 2009. Secara umum penurunan ini karena adanya perubahan metode pengukuran dimana secara nasional dan provinsi mengalami hal yang sama. Kondisi penurunan capaian ini terjadi disebabkan oleh karena pada periode 2005 sampai dengan 2013 cakupan wilayah administratif Kabupaten Belu masih termasuk Kabupaten Malaka yang telah menjadi daerah otonomi baru pada tahun 2013 sehingga capaian IPM pada akhir 2014 hanya meliputi Kabupaten Belu saja tanpa Kabupaten Malaka. Substansi menurunnya IPM ini sebagai dampak dari terpisahnya Kabupaten Malaka dari Kabupaten Belu adalah menurunnya jumlah penduduk Kabupaten Belu, berkurangnya luas wilayah, berkurangnya jumlah sarana infrastruktur pendidikan dan kesehatan, berkurangnya jumlah tenaga pengajar dan partisipasi sekolah pada semua jenjang pendidikan, berkurangnya jumlah tenaga kesehatan dan fasilitas kesehatan serta berkurangnya cakupan sektor-sektor ekonomi sebagai penyangga pertumbuhan IPM. Sehingga pada perhitungan statistik untuk Kabupaten Belu sendiri pada akhir tahun 2014 dan seterusnya hanya

mencakup seluruh kondisi riil saja baik luas wilayah, jumlah kecamatan dan desa, jumlah penduduk dan lainnya.

Kemudian pencapaian IPM pada periode ketiga tahun 2015-2019 menempati angka 62,54. Sebuah prestasi yang baik jika dibanding dengan pencapaian pada tahun 2014 akhir periode kedua RPJPD. Meningkat 2,82 poin dari pencapaian di periode kedua di angka 59,72. Peningkatan ini berkat kerja keras Pemerintah Daerah Kabupaten Belu saat itu melalui berbagai arah kebijakan dan program strategis di bidang pendidikan, kesehatan dan perekonomian daerah.

Pada periode akhir RPJPD tahun 2020-2025 tepatnya akhir tahun 2022 capaian IPM mengalami peningkatan 0,69 poin dari periode sebelumnya yakni di posisi 63,23. Dengan demikian terhadap pencapaian 63,23 pada tahun 2022, Kabupaten Belu berhasil menaikkan angka IPM sebesar 87,94% dari target 71,90 di akhir periode RPJPD. Ini merupakan sebuah pencapaian yang kurang terlalu signifikan secara periodik. Namun secara keseluruhan capaian kinerja IPM Kabupaten Belu meningkat sangat baik jika ditinjau dari tahun awal perencanaan tahun 2005. Pada tahun 2005 kondisi IPM berada pada angka 61,22 sedangkan pencapaian IPM pada akhir tahun 2022 bertambah 2,01 poin menjadi 63,23. Dengan demikian masih tersisa 12,06% menuju angka 71,90 yang perlu diraih oleh pemerintah Kabupaten Belu pada akhir tahun 2024.

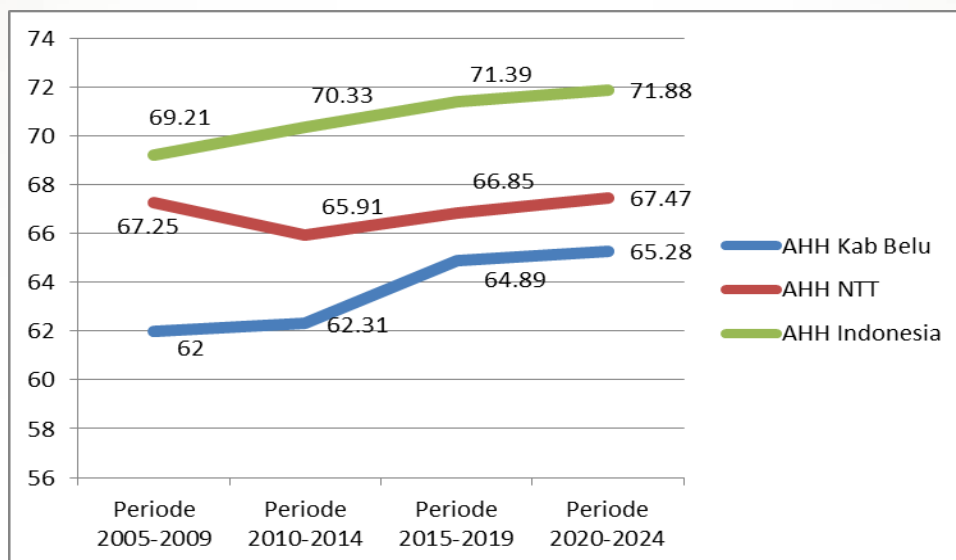
Di lain pihak, perkembangan IPM Kabupaten Belu masih berada di bawah rata-rata pertumbuhan IPM tingkat Provinsi NTT maupun secara nasional. Pencapaian target IPM pada setiap periode RPJPD selalu mengambil posisi di bawah prestasi yang diraih secara rata-rata tingkat provinsi NTT maupun tingkat hitungan nasional. Artinya bahwa terdapat beberapa kabupaten lain di Nusa Tenggara Timur yang memiliki prestasi capaian IPM yang jauh di atas Kabupaten Belu. Sehingga pada periode RPJPD selanjutnya pemerintah daerah Kabupaten Belu harus mengambil langkah strategis dengan menempatkan perhatian yang serius pada program pendidikan, kesehatan dan perekonomian daerah dengan karya-

karya yang inovatif sehingga IPM Kabupaten Belu dapat dicapai sebagaimana yang direncanakan.

2.2. Analisis Capaian Sasaran Pokok Indikator Angka Harapan Hidup

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 4 tahun 2016 tentang perubahan atas peraturan daerah nomor 3 tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Belu Tahun 2005-2025, indikator angka harapan hidup secara legal formal hanya ditetapkan dalam dokumen RPJPD Kabupaten Belu pada dua periode terakhir RPJPD yakni periode 2015-2019 dan tahun 2020-2025. Sementara pada dua periode awal RPJPD tidak menjadi bagian dari indikator daerah.

Grafik 2.2. Pertumbuhan Usia Harapan Hidup Periode RPJPD Tahun 2005-2025



Sumber: BPS.Belu

Kondisi rata-rata angka harapan hidup manusia di Kabupaten Belu pada awal perencanaan RPJPD pada tahun 2005 berada usia 64,30 tahun. Target capaian yang ditetapkan dalam RPJPD pada periode 2015-2019 dan 2020-2025 secara berturut-turut adalah 68,30 tahun dan 70,69 tahun. Pencapaian target angka harapan hidup manusia di Kabupaten Belu sebagai hasil upaya setiap individu sebagai manusia dan intervensi

program pembangunan Pemerintah Kabupaten Belu menunjukkan hasil yang positif /baik. Usia harapan hidup mengalami sedikit peningkatan walaupun masih jauh dari target yang direncanakan.

Pada akhir periode 2015-2019 angka harapan hidup menyentuh angka 64,35 tahun atau meningkat 0,05 tahun dari kondisi tahun 2005. Sedangkan pada tahun 2022 usia harapan hidup manusia Kabupaten Belu bergeser positif menyentuh di angka 65,98 tahun atau meningkat 1,43 tahun dari akhir periode ketiga RPJPD tahun 2019. Dengan demikian jika capaian kinerja dihitung dari kondisi awal perencanaan tahun 2005 sebagai tahun pijak maka usia harapan hidup manusia di Kabupaten Belu meningkat 1,08 tahun yakni 64,30 tahun menjadi 65,98 tahun. Di lain sisi, perkembangan angka harapan hidup masyarakat Kabupaten Belu masih berada di bawah rata-rata pertumbuhan angka harapan hidup tingkat Provinsi NTT maupun secara nasional. Pencapaian target angka harapan hidup pada setiap periode RPJPD selalu mengambil posisi di bawah prestasi yang diraih secara rata-rata tingkat provinsi NTT maupun tingkat hitungan nasional. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat beberapa kabupaten lain di Nusa Tenggara Timur yang memiliki prestasi angka harapan hidup yang jauh di atas Kabupaten Belu.

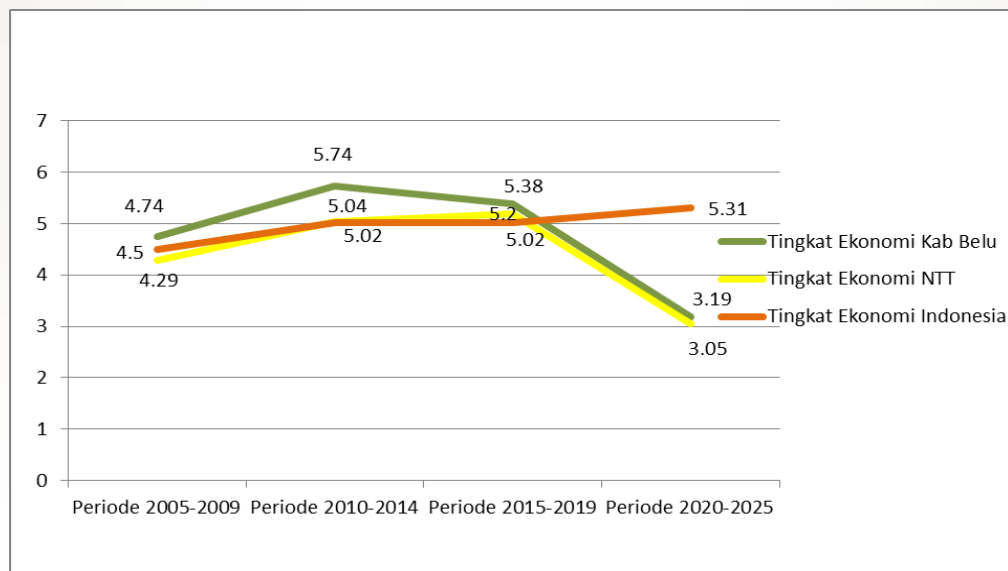
Terlepas dari kuasa Tuhan sang pencipta manusia dan alam semesta, pencapaian target ini masih jauh dari target yang ditetapkan. Sehingga atas dasar kondisi ini, pemerintah Kabupaten Belu harus melakukan program-program terobosan baru yang mendukung indikator-indikator penentu meningkatnya AHH menjadi lebih baik pada periode RPJPD Kabupaten Belu selanjutnya.

2.3. Analisis Capaian Sasaran Pokok Indikator Pertumbuhan Ekonomi Daerah

Kondisi pertumbuhan ekonomi Kabupaten Belu pada awal tahun perencanaan yakni tahun 2005 adalah 4,99%. Terhadap kondisi tersebut pada target pencapaian RPJPD di tahun 2025, pemerintah Kabupaten

Belu menargetkan 7,77%. Berbagai upaya melalui arah kebijakan dan program pembangunan telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Belu terhadap fokus pencapaian indikator pertumbuhan ekonomi namun belum dicapai secara optimal. Sehingga pencapaian target pertumbuhan ekonomi pada akhir periode pertama RPJPD tahun 2005-2009 hanya 4,74% saja. Pencapaian ini sedikit menurun dari kondisi awal perencanaan di tahun 2005 dimana pertumbuhan ekonomi berada di posisi 4,99% atau menurun 0,25%.

Grafik 2.3. Pertumbuhan Ekonomi Periode RPJPD Tahun 2005-2025



Sumber: BPS.Belu

Pada tahapan periode kedua RPJPD yakni tahun 2010-2014 capaian pertumbuhan ekonomi berada pada posisi 5,74 meningkat 1% dari capaian tahun 2009. Apabila pertumbuhan ekonomi ditinjau dari kondisi tahun 2005 maka terjadi peningkatan sebanyak 0,75% di akhir periode kedua RPJPD tahun 2009. Ini menunjukkan bahwa kondisi perekonomian daerah Kabupaten Belu sangat baik secara hitungan makro.

Kondisi pertumbuhan ekonomi dalam kurun waktu dua periode awal RPJPD ini masih mencakup perhitungan matematis yang melibatkan

wilayah administratif Kabupaten Malaka yang saat itu masih menjadi bagian dari lingkup pemerintah daerah Kabupaten Belu sampai dengan tahun 2013 silam. Sehingga perhitungan angka pertumbuhan ekonomi untuk Kabupaten Belu yang terpisah dari Kabupaten Malaka diperoleh pada tahun 2014 hingga sekarang.

Pencapaian kinerja pertumbuhan ekonomi pada periode ketiga RPJPD tahun 2015-2019 menempati angka 5,38%. Pencapaian ini mengalami penurunan 0,36% dari periode sebelumnya. Artinya bahwa kinerja pemerintah daerah menurun dipengaruhi oleh banyak faktor baik internal maupun eksternal.

Penurunan pertumbuhan ekonomi terus berlanjut pada periode keempat akhir RPJPD yakni pada tahun 2022 pertumbuhan ekonomi di angka 3,19% atau menurun 2,19% dari periode RPJPD ketiga. Bahkan jika dibandingkan dengan kondisi pertumbuhan ekonomi pada tahun 2005, pertumbuhan ekonomi merosot 1,80%. Hal ini menunjukkan bahwa secara angka kondisi ekonomi makro di tahun 2005 walau Kabupaten Malaka masih termasuk dalam hitungan statistik lebih baik dibandingkan dengan kondisi akhir tahun 2022.

Tidak bisa dipungkiri bahwa faktor utama penurunan itu disebabkan oleh fenomena pandemi covid19 yang terjadi pada awal tahun 2020 hingga akhir tahun 2022 yang pada saat ini sudah beralih status menjadi endemi. Fenomena pandemi covid19 menghancurkan sendi-sendi dan tatanan perekonomian masyarakat, nasional dan global. Dengan pencapaian akhir pertumbuhan ekonomi pada tahun 2022 yang hanya 3,19% menunjukkan bahwa pencapaian baru mencapai 41,06% dari target pertumbuhan ekonomi 7,77% di akhir periode RPJPD Kabupaten Belu.

Data tren pertumbuhan ekonomi di atas juga menunjukkan perbandingan prestasi dan kinerja antara kabupaten, tingkat provinsi NTT dan nasional. Terlihat bahwa pada periode pertama sampai dengan periode ketiga RPJPD, Kabupaten Belu meraih capaian pertumbuhan

ekonomi di atas rata-rata capaian tingkat provinsi NTT maupun secara nasional. Artinya bahwa capaian Kabupaten Belu memberikan kontribusi pertumbuhan ekonomi yang lebih dalam mendongkrak capaian target provinsi dan nasional sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2019. Fenomena covid19 yang terjadi sejak awal tahun 2020 hingga akhir 2022 menyebabkan keadaan ekonomi global merosot drastis sehingga pertumbuhan ekonomi Kabupaten Belu menurun hingga 3,19%. Namun penurunan ini masih sedikit di atas capaian di tingkat provinsi 3.05% saja kendatipun masih jauh di bawah pertumbuhan ekonomi secara nasional di angka 5,31%.

Kondisi menurunnya pertumbuhan ekonomi tersebut membutuhkan perhatian serius dari pemerintah Kabupaten Belu melalui gebrakan dan terobosan arah kebijakan pembangunan daerah yang inovatif dan efektif untuk mengembalikan kondisi perekonomian ke arah yang lebih kondusif sehingga sedapat mungkin target RPJPD yang telah ditetapkan dapat tercapai pada periode selanjutnya.

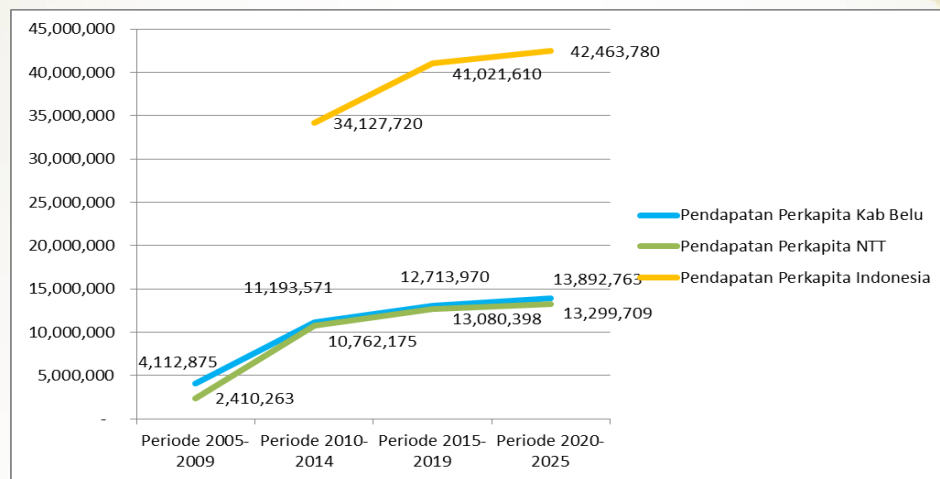
2.4. Analisis Capaian Sasaran Pokok Indikator Pendapatan Perkapita Atas Dasar Harga Konstan

Kondisi pendapatan perkapita Kabupaten Belu pada awal tahun perencanaan yakni tahun 2005 adalah Rp.2,191,031,00. Kondisi pendapatan perkapita pada tahun 2005 ini menunjukkan bahwa masyarakat Kabupaten Belu masih jauh dari keadaan tingkat kesejahteraan yang baik. Terhadap kondisi tersebut, pemerintah daerah Kabupaten Belu menargetkan peningkatan pendapatan perkapita pada setiap periode RPJPD sebagai berikut: periode pertama ditargetkan Rp. 1,858,093,00, periode kedua ditargetkan Rp.2,340,378,00, sementara di periode ketiga ditargetkan Rp.18,584,896,00 dan pada periode akhir ditargetkan Rp.25,186,756,00.

Peningkatan pendapatan perkapita sejak ditetapkannya RPJPD Kabupaten Belu Tahun 2005-2025 menjadi salah satu fokus perhatian

dari arah kebijakan pembangunan daerah sejak tahun 2005 hingga akhir periode RPJPD. Penyelenggaraan program kegiatan yang diarahkan kepada peningkatan pendapatan masyarakat melalui berbagai instansi pemerintah dengan alokasi anggaran yang cukup, sejauh ini sejak tahun 2005 terjadi peningkatan pendapatan perkapita yang cukup baik.

Grafik 2.4. Pertumbuhan Pendapatan Perkapita Periode RPJPD Tahun 2005-2025



Sumber: BPS.Belu

Pada akhir periode RPJPD tahun 2005-2009 pendapatan perkapita masyarakat Kabupaten Belu melampaui target yakni sebesar Rp.4,112,875,00 atau capaian 221,35% dari target rencana Rp. 1,858,093,00. Pencapaian ini merupakan hasil kerja pemerintah daerah dan usaha semua masyarakat dalam mengelola dan memanfaatkan sektor-sektor ekonomi yang tersedia di Kabupaten Belu yang tersebar di 24 kecamatan dan 208 desa/kelurahan (masih termasuk Kabupaten Malaka).

Peningkatan pendapatan perkapita ini terus terjadi pada periode kedua RPJPD tahun 2010-2014 sebesar Rp.11,193,571,00 atau kenaikan 478,28% dari yang ditargetkan Rp.2,340,378,00. Kondisi ini merupakan lonjakan peningkatan yang cukup signifikan jika dibandingkan dengan capaian pada periode pertama RPJPD pasca terpisahnya Kabupaten Malaka dari Kabupaten Belu sejak tahun 2013 yang lalu. Mengapa

demikian? Disinyalir faktor utama meningkatnya pendapatan perkapita ini selain akibat kinerja pemerintah daerah yang baik, penambahan arus jumlah penduduk yang besar dan aset bergerak pasca referendum Provinsi Timor-timur menjadi Negara Timor Leste pada tahun 1999 yang masuk ke wilayah Kabupaten Belu sangat memberikan kontribusi besar bagi peningkatan Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Belu.

Kenaikan pendapatan perkapita pada periode kedua RPJPD memberikan pengaruh positif terhadap kenaikan pendapatan pada periode ketiga RPJPD tahun 2015-2019 yakni sebesar Rp.13,080,398,00 jika dibandingkan dengan capaian pada periode kedua. Walaupun data menunjukkan terjadi peningkatan dari periode kedua, kenaikan ini merupakan pencapaian yang tidak mencapai jumlah yang ditargetkan pada periode ketiga RPJPD sebesar Rp. Rp.18,584,896,00. Artinya bahwa semua aset sektor ekonomi digerakkan oleh seluruh masyarakat serta program pembangunan pemerintah Kabupaten Belu hanya mampu mencapai target hanya 70,38% saja.

Selanjutnya pada periode keempat sebagai akhir RPJPD yakni pada akhir tahun 2022 capaian target pendapatan perkapita sebesar Rp.13,892,763,00 yang jika dibandingkan dengan capaian periode ketiga kenaikan hanya sedikit yakni sebesar Rp.812,365,00 saja. Sama halnya dengan situasi pada periode ketiga RPJPD, kenaikan ini merupakan pencapaian yang tidak mencapai jumlah yang ditargetkan pada periode keempat RPJPD sebesar Rp. Rp.25,186,756,00 yang artinya pencapaian target 55,16% saja.

Secara umum telah terjadi peningkatan pendapatan perkapita masyarakat Kabupaten Belu pada setiap periode RPJPD yang secara langsung berdampak pada perubahan kesejahteraan masyarakat. Secara keseluruhan perbandingan pendapatan perkapita kondisi awal RPJPD tahun 2005 berada pada posisi Rp.2,191,031,00, sedangkan pada akhir

periode RPJPD tahun 2022 meningkat drastis menjadi Rp.13,892,763,00 atau meningkat 634,07%.

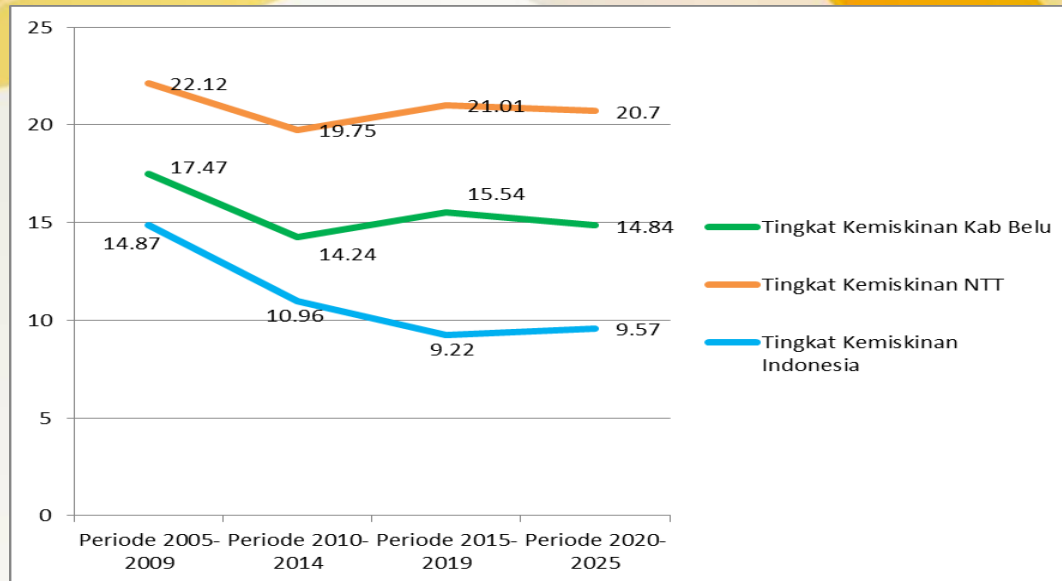
Sejak awal hingga akhir periode RPJPD realitas menunjukkan bahwa pencapaian pendapatan perkapita antara Kabupaten Belu dengan rata-rata pertumbuhan di tingkat provinsi NTT relatif sama dan tidak mengalami perbedaan yang signifikan besarnya. Sementara apabila dibandingkan dengan capaian pendapatan perkapita di nasional, pendapatan perkapita kabupaten Belu dan provinsi NTT masih sangat terlampau rendah.

Namun dari aspek pencapaian target, pemerintah daerah Kabupaten Belu melalui kebijakan pembangunan ekonomi belum berhasil mencapai target sebagaimana direncanakan yang berdampak pada upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu pada periode RPJPD selanjutnya perlu dilakukan perubahan perlakuan terhadap kebijakan program pembangunan ekonomi daerah secara progresif mengarah pada peningkatan pendapatan masyarakat.

2.5. Analisis Capaian Sasaran Pokok Indikator Angka Kemiskinan

Jumlah penduduk miskin Kabupaten Belu pada awal tahun perencanaan RPJPD yakni tahun 2005 sebesar 47,88%. Jumlah tersebut saat itu masih termasuk 12 kecamatan dari Kabupaten Malaka yang telah menjadi daerah otonomi baru pada tahun 2013. Angka kemiskinan ini sangat tinggi mencakup hampir setengah jumlah penduduk. Kondisi ini menjadi acuan penting bagi pemerintah daerah Kabupaten Belu dalam perumusan kebijakan pembangunan dengan *mengutamakan program* pengentasan kemiskinan yang sejalan dengan program pemerintah pusat. Berdasarkan kondisi di atas maka gerakan pengentasan kemiskinan menjadi salah satu indikator utama daerah dalam RPJPD Kabupaten Belu Tahun 2005-2025 guna mengurangi jumlah penduduk miskin.

Grafik 2.5. Pertumbuhan Tingkat Kemiskinan Periode RPJPD Tahun 2005-2025



Sumber: BPS.Belu

Kabupaten Belu menargetkan penurunan jumlah penduduk miskin sampai dengan akhir periode RPJPD secara berturut-turut meliputi: periode pertama tahun 2005-2009 ditargetkan sebesar 21,02%; pada periode kedua tahun 2010-2014 ditargetkan sebesar 16,02%; kemudian pada periode ketiga tahun 2015-2019 ditargetkan sebesar 11,29% dan pada akhir periode RPJPD tahun 2020-2025 ditargetkan sebesar 9,13% dari jumlah penduduk.

Berbagai langkah strategis melalui upaya pengentasan kemiskinan yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Belu termasuk dukungan program pengentasan kemiskinan dari pemerintah pusat melalui kementerian/lembaga terkait, angka kemiskinan di Kabupaten Belu dapat ditekan selama empat periode RPJPD ini. Pada akhir periode pertama RPJPD pemerintah Kabupaten Belu berhasil menurunkan angka kemiskinan dari 47.88% di tahun 2005 menjadi 17,47% di tahun 2009. Sebuah keberhasilan yang sangat signifikan oleh karena pencapaian jauh melampaui target yang ditetapkan pada periode pertama. Jumlah ini termasuk penduduk miskin yang tersebar di 12 kecamatan pada Kabupaten Malaka yang masih menjadi bagian kewenangan dari

Kabupaten Belu sebelum pemekaran daerah otonomi baru di tahun 2013 silam.

Pada periode kedua RPJPD, jumlah masyarakat miskin berhasil diturunkan lagi dari 17,47% menjadi 14,24%. Namun situasi capaian target berbalik secara fluktuatif pada periode ketiga dan keempat secara berturut-turut angka kemiskinan kembali bergerak naik turun sekitar 1% ke angka 15,54% dan 14,84%. Artinya sampai dengan akhir periode RPJPD tepatnya tahun 2022 berhasil menurunkan angka kemiskinan ke angka yang cukup optimis rendah walaupun masih cukup jauh dari angka yang ditargetkan. Menyikapi kondisi ini, dibutuhkan perhatian dan kerja ekstra serius oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Belu sehingga bisa mencapai angka capaian target di 9,13% penduduk miskin.

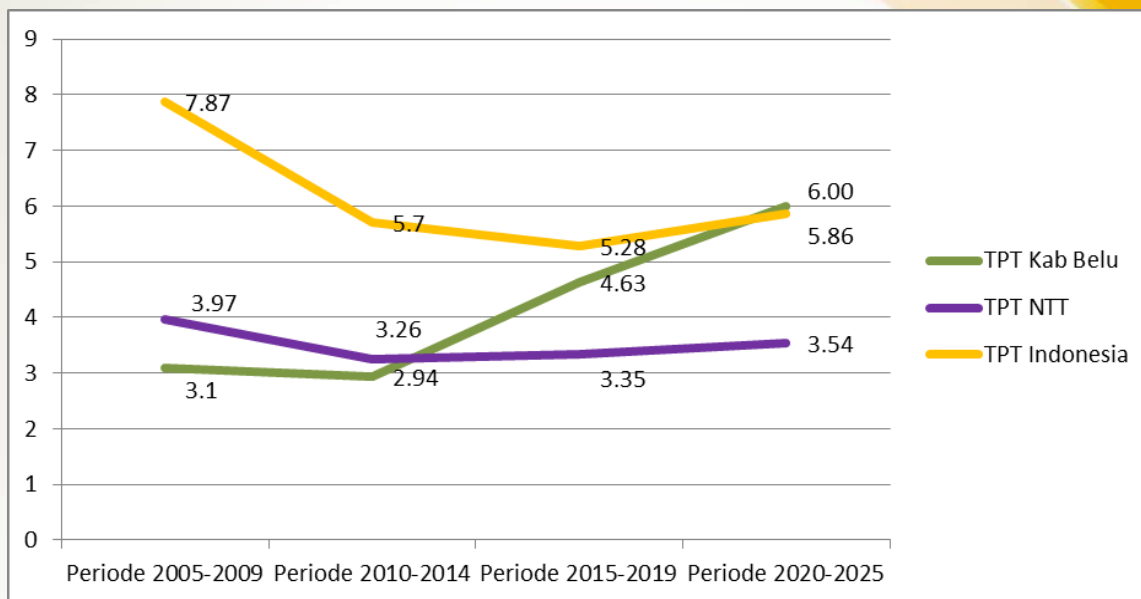
Patut diapresiasi terhadap capaian penurunan angka kemiskinan Kabupaten Belu yang baik memberikan sumbangan berarti bagi penurunan angka kemiskinan secara nasional dari 14,87% di tahun 2009 menjadi 9,57% di tahun 2022. Prestasi yang diraih juga melebihi capaian rata-rata di tingkat provinsi NTT pada setiap periode RPJPD.

2.6. Analisis Capaian Sasaran Pokok Indikator Tingkat Pengangguran Terbuka

Berdasarkan Dokumen RPJPD yang ada, indikator tingkat pengangguran terbuka menjadi salah satu indikator daerah dalam RPJPD 2005-2025 hanya ditargetkan pada periode RPJPD ketiga dan keempat. Hal ini disebabkan oleh karena pada dokumen RPJPD sebelumnya yakni peraturan daerah nomor 3 tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Belu Tahun 2005-2025, indikator tersebut tidak menjadi indikator makro daerah untuk dicapai pada setiap periode RPJPD. Namun indikator tingkat pengangguran terbuka ditetapkan menjadi indikator daerah berdasarkan dasar Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 4 tahun 2016 tentang perubahan atas peraturan daerah nomor 3 tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Daerah Kabupaten Belu Tahun 2005-2025. Sehingga penetapan target capaian indikator ini ditetapkan pada periode ketiga dan periode keempat RPJPD.

Grafik 2.6. Pertumbuhan Tingkat Pengangguran Terbuka Periode RPJPD Tahun 2005-2025



Sumber: BPS.Belu

Berdasarkan Dokumen RPJPD, pemerintah daerah Kabupaten Belu menargetkan tingkat pengangguran terbuka pada periode ketiga tahun 2015-2019 pada posisi 2,43%. Sedangkan pada akhir periode RPJPD tahun 2020-2025 pemerintah daerah Kabupaten Belu optimis menargetkan angka *ultimate* tingkat pengangguran terbuka di angka 1,81%.

Optimisme Pemerintah Daerah Kabupaten Belu untuk menurunkan angka pengangguran terbuka sangat tinggi dengan menyelenggarakan berbagai program yang berkenaan langsung dengan pengurangan jumlah pengangguran. Arah kebijakan pembangunan yang merujuk pada kegiatan pemberdayaan masyarakat berupa pelatihan peningkatan keterampilan masyarakat di semua kalangan seperti pelatihan keterampilan bagi karang taruna, pelatihan menjahit, pelatihan meubeler, pelatihan otomotif, pelatihan BUMDes, pemberian modal usaha bagi

wirausaha kecil dan menengah, pelatihan tenun ikat, pelatihan budidaya pertanian dan lain-lainnya telah dijalankan sejak penetapan RPJPD Kabupaten Belu tahun 2005-2025.

Usaha dan kerja keras pemerintah Kabupaten Belu pada akhirnya pada periode ketiga RPJPD tingkat pengangguran berada pada angka 4,63% sementara angka yang ditargetkan harus 2,43%. Artinya upaya Pemerintah Kabupaten Belu belum mencapai target yang ditetapkan.

Kemudian pada tahapan akhir periode RPJPD untuk tahun 2022 tingkat pengangguran terbuka kembali naik pada posisi 6%. Penyebab kenaikan tingkat pengangguran dari dua periode akhir RPJPD tersebut disinyalir sebagai dampak ekonomi pasca pandemi covid19 dan arus masuk penduduk ke Kabupaten Belu yang menyebabkan pertumbuhan penduduk meningkat pada tahun 2022.

Kondisi pencapaian ini menggambarkan suatu kegagalan dalam menurunkan angka pengangguran masyarakat Kabupaten Belu oleh karena sejak awal periode RPJPD hingga akhir jumlah masyarakat yang menganggur cenderung naik signifikan melebihi rata-rata tingkat provinsi maupun nasional yang cenderung menurun persentasenya.

Terhadap kondisi tingkat pengangguran terbuka yang masih tinggi dibutuhkan strategi kebijakan pembangunan yang tepat guna dan tepat sasaran pada tahapan periode pembangunan selanjutnya sehingga dapat memberikan ruang dan kesempatan kerja yang memadai/seluas - luasnya bagi seluruh masyarakat kabupaten Belu, di tengah tantangan besar bagi pemerintah Kabupaten Belu dalam memanfaatkan era industri 4.0, digital dan era *Artificial Intelligent* (AI).

2.7. Analisis Capaian Sasaran Pokok Indikator Angka Prevalensi Kekurangan Gizi

Berdasarkan dokumen RPJPD yang ditetapkan dengan peraturan daerah nomor 3 tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Belu Tahun 2005-2025, indikator Prevalensi

Kekurangan Gizi ditetapkan menjadi indikator makro daerah untuk dicapai pada setiap periode RPJPD. Namun berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 4 tahun 2016 tentang perubahan atas peraturan daerah nomor 3 tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Belu Tahun 2005-2025 tidak menetapkan indikator prevalensi kekurangan gizi sebagai indikator makro daerah dalam RPJPD 2005-2025 pada periode RPJPD ketiga dan keempat. Oleh karena itu sebagai informasi pencapaian angka prevalensi kekurangan gizi di periode ketiga RPJPD tahun 2015-2019 Kabupaten Belu berada pada posisi 16,8%. Situasi tetap meningkat pada periode akhir RPJPD yakni pada tahun 2022 angka prevalensi kekurangan gizi bertambah menjadi 20,98%.

Kondisi ini menunjukkan bahwa upaya pemerintah Kabupaten Belu untuk menurunkan angka kekurangan gizi di masyarakat belum membuahkan hasil sesuai ekspektasi.

2.8. Analisis Capaian Sasaran Pokok Indikator Kejadian Kematian Bayi (KKB)

Berdasarkan dokumen RPJPD yang ditetapkan dengan peraturan daerah nomor 3 tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Belu Tahun 2005-2025, indikator kejadian kematian bayi (KKB) ditetapkan menjadi indikator makro daerah untuk dicapai pada setiap periode RPJPD. Namun berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 4 tahun 2016 tentang perubahan atas peraturan daerah nomor 3 tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Belu Tahun 2005-2025 tidak menetapkan indikator kejadian kematian bayi (KKB) menjadi salah satu indikator daerah dalam RPJPD 2005-2025 pada periode RPJPD ketiga dan keempat dengan pertimbangan indikator kejadian kematian bayi (KKB) merupakan indikator kinerja kunci perangkat daerah terkait bukan sebagai indikator kinerja utama (IKU) daerah. Dengan demikian sebagai informasi

pencapaian angka kejadian kematian bayi (KKB) di periode ketiga RPJPD tahun 2015-2019 Kabupaten Belu terjadi 80 kejadian. Namun pada periode akhir RPJPD tepatnya tahun 2022 kasus kematian bayi menurun menjadi 48 kejadian. Peristiwa menurunnya kasus kematian bayi pada dua periode akhir RPJPD tersebut menunjukkan bahwa kerja keras program kesehatan penanggulangan kematian bayi dinilai berhasil dan patut diacungi jempol.

Oleh karena itu prestasi ini wajib dipertahankan dan ditingkatkan pelayanan kesehatan bayi sedapat mungkin hingga ke titik 0.

2.9. Analisis Capaian Sasaran Pokok Indikator Kejadian Kematian Ibu (KKI)

Berdasarkan dokumen RPJPD yang ditetapkan dengan peraturan daerah nomor 3 tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Belu Tahun 2005-2025, indikator kejadian kematian ibu (KKI) ditetapkan menjadi indikator makro daerah untuk dicapai pada setiap periode RPJPD. Namun berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 4 tahun 2016 tentang perubahan atas peraturan daerah nomor 3 tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Belu Tahun 2005-2025 indikator kejadian kematian ibu (KKI) tidak menjadi salah satu indikator daerah dalam RPJPD 2005-2025 pada periode RPJPD ketiga dan keempat dengan pertimbangan indikator kejadian kematian ibu (KKI) merupakan indikator kinerja kunci perangkat daerah terkait bukan sebagai indikator kinerja utama (IKU) daerah.

Dengan demikian sebagai informasi pencapaian angka kejadian kematian ibu (KKI) di periode ketiga RPJPD tahun 2015-2019 Kabupaten Belu terjadi 5 kejadian. Namun pada periode akhir RPJPD tepatnya tahun 2022 kasus kematian ibu mengalami kenaikan menjadi 6 kejadian. Peristiwa meningkatnya kasus kematian ibu pada dua periode akhir RPJPD tersebut menunjukkan bahwa kerja keras program kesehatan

penanggulangan kematian ibu dinilai cukup baik walaupun terjadi penambahan 1 kasus pada tahun 2022.

Oleh karena itu prestasi ini wajib dipertahankan dan upaya pelayanan kesehatan ibu ditingkatkan jumlah kejadian kematian ibu sedapat mungkin diturunkan ke angka yang lebih rendah lagi.

BAB III

FAKTOR PENDORONG DAN PENGHAMBAT PENCAPAIAN KINERJA

Implementasi program pembangunan daerah tentu saja tidak harus berjalan mulus seperti yang diharapkan. Ini merupakan fenomena bahkan sebuah hukum alam yang terjadi di seluruh belahan dunia. Semua Negara, perusahaan, organisasi besar maupun kecil dipastikan mengalami hal demikian dimana situasi riil dalam realisasi program selalu ada kesenjangan antara perencanaan dengan kenyataan pelaksanaan program kerja pembangunan. Sebuah keniscayaan bahwa penyelenggaraan pembangunan daerah selalu ada faktor-faktor yang menjadi penghambat baik dalam tahapan perumusan kebijakan pembangunan, implementasi rencana program pembangunan maupun kendala dalam melakukan pengendalian dan evaluasi atas pelaksanaan pembangunan yang sedang berjalan. Namun di sisi lain, pelaksanaan pembangunan juga dapat terwujud sesuai dengan harapan atau yang telah direncanakan sebelumnya oleh karena dipengaruhi oleh faktor-faktor yang menjadi pendukung atau pendorong terwujudnya target pencapaian kinerja sebagaimana yang direncanakan oleh pemerintah daerah Kabupaten Belu.

3.1. Faktor Pendorong Pencapaian Kinerja

3.1.1. Analisis Faktor Pendorong Pencapaian Kinerja Indikator Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. Sebagai ukuran kualitas hidup, IPM dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar. Dimensi tersebut mencakup umur panjang dan sehat; pengetahuan dan standar hidup yang layak. Ketiga dimensi dasar tersebut perlu diwujudkan dan diperjuangkan target pencapaiannya demi kemaslahatan hidup rakyat dan warga negara. Kebijakan dan arah

pembangunan pemerintah daerah wajib memperhitungkan indikator IPM dalam target-target pembangunan daerah.

Sesuai dengan hasil evaluasi pencapaian target kinerja, IPM selalu meningkat setiap periode RPJPD tetapi belum mencapai target di akhir periode RPJPD. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) ditargetkan meningkat menjadi 71,90% pada tahun 2024 namun hingga akhir tahun 2022 pencapaian baru mencapai 63,23% saja. Pencapaian masih signifikan jauh dari target yang ditetapkan dalam RPJPD. Masih sekitar 12,06% capaian yang harus dikejar oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Belu sehingga bisa mencapai angka IPM 71,90%.

Walaupun belum mencapai target IPM 71,90% di akhir periode RPJPD namun selalu terjadi peningkatan IPM pada setiap periode RPJPD. Peningkatan ini didorong oleh beberapa faktor dominan meliputi: ketersediaan fasilitas kesehatan yang memadai dengan jumlah yang selalu bertambah sejak satu dekade terakhir yang terdiri dari 4 unit rumah sakit, 17 unit puskesmas prototipe dan 14 pustu dengan fasilitas serta manajemen pelayanan kesehatan yang baik tersebar di 12 kecamatan, ketersediaan tenaga kesehatan (dokter spesialis, dokter umum, perawat, bidan dan lain-lain) yang memadai, sarana pendukung kesehatan seperti obat-obatan dan lainnya cukup tersedia, serta kebijakan fiskal bidang kesehatan sebesar 10% minimal dari total APBD tahunan yang memadai.

Aspek pengetahuan yakni kontribusi bidang pendidikan terhadap IPM pun cukup signifikan baiknya. Perkembangan angka partisipasi anak sekolah terhadap jenjang pendidikan SD dinilai berkembang baik dimana pada tahun 2022 angka partisipasi kasar (APK) pendidikan dasar dalam 5 tahun terakhir berada di atas poin 95%. Sementara angka partisipasi kasar (APK) SMP di atas 80% pada lima tahun terakhir. Penilaian angka partisipasi murni (APM) jenjang pendidikan dasar pun dalam 5 tahun terakhir dalam kondisi kondusif. Rata-rata APM pendidikan dasar SD

lima tahun terakhir adalah 80% sementara jenjang pendidikan SMP mencapai 74% dalam kondisi baik.

Tabel 3.1. Perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM) SD sampai SMP Di Kabupaten Belu Tahun 2017-2022

No	Jenjang Pendidikan	Tahun Capaian APK					
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	SD/MI	99.92	98.67	97.2	96.55	102.02	95.31
2	SMP/MTs	78.49	80.79	86.57	87.52	100.62	87.47
		Tahun Capaian APM					
1	SD/MI	80.5	80.43	84.57	72.87	80.26	80.36
2	SMP/MTs	73.09	78.91	78.99	86.45	65.63	62.43

Sumber data: Profil Belu Tahun 2023.

Sarana pendidikan secara berjenjang mulai dari PAUD, TK, SD, SMP, SLTA sangat memadai, jumlah guru pengajar dan tenaga tutor pendidikan cukup memadai yang juga dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah daerah yang merekrut jumlah tenaga pengajar dengan kuota yang besar setiap tahun anggaran, jumlah peserta didik, fasilitas pendukung pendidikan di setiap satuan pendidikan seperti perpustakaan dan laboratorium cukup memadai. Di samping itu juga kebijakan fiskal pendidikan sangat memadai melalui dana BOS, dana insentif sertifikasi tenaga pendidik.

Tabel 3.2. Jumlah Sekolah, PAUD dan Tenaga Pendidik Kabupaten Belu Tahun 2022

No.	Kecamatan	Jumlah Sekolah Dasar	Jumlah Guru SD	Jumlah PAUD	Jumlah Tutor PAUD	Jumlah SLTP	Jumlah Guru SLTP
1	Raimanuk	12	177	20	51	5	116
2	Tasifeto Barat	20	277	27	63	10	202
3	Kakuluk Mesak	12	188	20	49	4	95
4	Nanaet Duabesi	5	47	8	16	1	23
5	Kota Atambua	14	311	17	59	6	135
6	Atambua Barat	5	125	14	39	4	75
7	Atambua Selatan	5	124	16	39	3	78
8	Tasifeto Timur	22	281	35	78	6	112
9	Raihat	14	167	13	33	4	79
10	Lasiolat	10	113	9	21	3	43
11	Lamaknen	18	185	16	35	5	93
12	Lamaknen Selatan	10	114	19	44	4	62
TOTAL		147	2109	214	527	55	1113

Sumber data: Profil Belu Tahun 2023.

Meningkatnya pendapatan perkapita masyarakat Kabupaten Belu pada setiap periode RPJPD turut bersumbangsih besar bagi pemenuhan kebutuhan hidup yang layak. Secara makro masyarakat Kabupaten Belu mampu memenuhi kebutuhan dasar secara baik. Hingga tahun 2022 jumlah rumah tangga yang telah menempati rumah milik sendiri sebanyak 90,11% rumah tangga. Terdapat 60,17% rumah tangga telah menggunakan sumur/mata air sebagai sumber air untuk keperluan hidup setiap hari. Kemudian sebanyak 82,21% rumah tangga telah menggunakan fasilitas buang air besar secara baik. Artinya bahwa dengan meningkatnya pendapatan masyarakat secara langsung menghantarkan masyarakat pada kondisi hidup dengan standar yang layak.

3.1.2. Analisis Faktor Pendorong Pendapatan Perkapita Atas Dasar Harga Konstan

Pendapatan perkapita adalah indikator atau tolak ukur dalam mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat pada suatu negara dan atau daerah. Formula pendapatan perkapita adalah total penghasilan suatu negara/daerah dibagi jumlah seluruh penduduknya sehingga diketahui pendapatan rata-rata penduduk tersebut. Apabila semakin tinggi nilai pendapatan perkapita suatu daerah maka masyarakat di daerah tersebut semakin makmur. Sebaliknya jika semakin kecil pendapatan perkapita suatu daerah pertanda bahwa masyarakat di daerah tersebut secara umum masih jauh dari kemakmuran.

Perolehan angka pendapatan perkapita melalui hasil pembagian antara besaran PRDB atas dasar harga konstan dengan jumlah penduduk tahun berkenaan. Apabila total PDRB kecil sedangkan jumlah penduduk besar maka pendapatan perkapita akan kecil dan atau sebaliknya. Sehingga besaran pendapatan perkapita tergantung jumlah PDRB harga konstan dengan jumlah penduduk daerah setempat.

Sesuai dengan data hasil evaluasi pencapaian target kinerja, pendapatan perkapita masyarakat Kabupaten Belu cenderung naik walaupun tidak mencapai angka yang ditargetkan pada setiap periode RPJPD. Terjadinya peningkatan pendapatan perkapita tersebut merupakan suatu prestasi yang baik yang diraih oleh Pemerintah Kabupaten Belu selama periode RPJPD tahun 2005-2025. Tidak sekedar meningkat begitu saja melainkan kenaikan pendapatan perkapita tersebut didukung oleh faktor-faktor kunci yang menjadi pendorong terwujudnya peningkatan angka tersebut.

Tabel 3.3. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Belu Tahun 2018-2022

Nilai PDRB/GRDP (Milliar Rupiah/Billion rupiahs)					
	2018	2019	2020	2021*	2022**
- ADHB/ at current price	4.147	4.482	4.550	4.700	5.037
- ADHK/ at 2010 Constant Price	2.806	2.957	2.968	3.020	3.116
PDRB per Kapita/Per Capita GRDP (Ribu Rupiah/Thousand rupiahs)					
- ADHB/ at current price	19.131	20.350	20.946	21.285	22.456
- ADHK/ at 2010 Constant Price	12.942	13.423	13.665	13.680	13.893
- Pertumbuhan PDRB per Kapita ADHK 2010/ Growth of Per Capita GRDP at 2010 Constant Price	4,04	3,71	1,80	0,11	1,56
Jumlah Penduduk (ribu orang)/ Population (Thousand People)	217	220	217	221	224
Pertumbuhan Jumlah Penduduk (Persen)/ Population Growth (Percent)	1,49	1,60	-1,38	1,63	1,60

Sumber Data: BDA Kab. Belu 2023.

Tabel 3.4. Pertumbuhan PDRB ADHK pada Dua Periode akhir RPJPD

Sektor Ekonomi PDRB	Kondisi Akhir Periode III RPJPD Tahun 2019 (Juta Rupiah)	Kondisi Akhir Periode IV RPJPD Tahun 2022 (Juta Rupiah)	Pertumbuhan Sektor PDRH AHDK pada Dua Periode Akhir RPJPD (Juta Rupiah)
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	660,906.84	716,138.22	55,231.38
Pertambangan dan Penggalian	85,088.09	64,656.60	(20,431.49)
Industri Pengolahan	32,282.25	35,089.39	2,807.14
Pengadaan Listrik dan Gas	1,858.12	2,323.61	465.49
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	634.84	769.07	134.23
Konstruksi	231,520.44	233,539.96	2,019.52
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	359,699.76	400,246.30	40,546.54
Transportasi dan Perdagangan	146,304.79	157,507.32	11,202.53
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	12,533.30	12,568.85	35.55
Informasi dan Komunikasi	138,834.65	166,035.16	27,200.51
Jasa Keuangan dan Asuransi	170,717.66	192,597.26	21,879.60
Real Estate	80,872.38	86,251.90	5,379.52
Jasa Perusahaan	1,976.56	1,411.70	(564.86)
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	399,631.09	416,122.39	16,491.30
Jasa Pendidikan	460,001.78	460,751.46	749.68
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	73,286.83	85,854.19	12,567.36
Jasa Lainnya	100,374.70	84,370.85	(16,003.85)
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	2,956,524.08	3,116,234.21	159,710.13

Sumber: Data Olahan BP4D Belu 2023.

Dari tabel 3.3 dan tabel 3.4 di atas terlihat bahwa total PDRB harga konstan sejak lima tahun terakhir selalu meningkat. Begitu pula jumlah penduduk sejak tahun 2018 hingga tahun 2022 selalu meningkat. Kenaikan jumlah penduduk disertai dengan meningkatnya PDRB berdampak pada meningkatnya pendapatan perkapita masyarakat Kabupaten Belu. Meningkatnya angka PDRB tersebut disebabkan oleh seluruh penduduk atau masyarakat Kabupaten Belu memanfaatkan sektor-sektor ekonomi, peningkatan produksi barang dan jasa dan berbagai lapangan usaha lainnya secara baik dan berkelanjutan. Dari tujuh belas sektor ekonomi PDRB terdapat lima belas sektor ekonomi yang mengalami peningkatan nominal sementara hanya tiga sektor yakni sektor pertambangan, sektor real estat dan sektor lainnya yang mengalami penurunan angka nominal terhadap PDRB. Di samping itu pula pemicu naiknya pendapatan perkapita masyarakat Kabupaten Belu disebabkan oleh tingkat ketergantungan akan komoditi pertanian, pangan

dan sarana infrastruktur dan berbagai logistik lainnya masyarakat Timor Leste pasca berdirinya negara Republic Democratic Timor Leste terhadap Indonesia khususnya Kabupaten Belu masih sangat tinggi.

3.1.3. Analisis Faktor Pendorong Menurunnya Angka Kemiskinan

Kemiskinan menjadi tolok ukur atau penentu utama kemajuan suatu daerah. Persoalan kemiskinan merupakan salah satu permasalahan pokok yang dihadapi negara sejak dulu hingga sekarang dan sampai saat ini belum ada bentuk penyelesaian yang tepat yang terlihat dari pemerintah. Meskipun berbagai perencanaan, kebijakan serta program pembangunan yang telah dan akan dilaksanakan pada intinya adalah mengurangi jumlah penduduk miskin. Permasalahan kemiskinan merupakan permasalahan yang kompleks dan multidimensional. Upaya pengurangan dan pengentasan kemiskinan harus dilakukan secara komprehensif mencakup seluruh aspek kehidupan dan dilaksanakan secara terpadu (*integrated collaborative*). Kemiskinan terjadi karena kemampuan masyarakat pelaku ekonomi tidak sama, sehingga terdapat masyarakat yang tidak dapat ikut serta dalam proses pembangunan atau menikmati hasil pembangunan.

Penurunan angka kemiskinan menjadi *pilot project* penyelenggaraan pembangunan daerah. Melalui arah kebijakan pembangunan pemerintah daerah Kabupaten Belu pada setiap periode kepemimpinan kepala daerah ke arah pengentasan kemiskinan, jumlah penduduk miskin secara gradual berhasil diturunkan pada setiap periode RPJPD. Berdasarkan evaluasi capaian kinerja, angka kemiskinan cenderung menurun pada dua periode akhir RPJPD walaupun selalu tidak mencapai target capaian pada setiap periode RPJPD.

Terjadinya penurunan angka kemiskinan secara gradual pada setiap periode RPJPD dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain adanya arah kebijakan pengentasan kemiskinan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah berkolaborasi dengan intervensi program

pemerintah pusat untuk memerangi kemiskinan. Kebijakan tersebut dilakukan melalui sedikitnya dua strategi yakni *pertama*, strategi dalam jangka pendek yaitu memindahkan berbagai sumber daya kepada kaum miskin dalam jumlah yang memadai. Perbaikan keadaan kemiskinan dalam jangka pendek di antaranya melalui:

1. Program peningkatan produktivitas pertanian, peternakan dan perikanan melalui bantuan kepada masyarakat berupa alat sistem pertanian seperti traktor besar dan kecil, alat pengolahan pertanian dan hasil pertanian seperti mesin pemipil jagung, mesin perontok padi, mesin pengolahan kopi dan berbagai teknologi tepat guna lainnya, bantuan berbagai benih komoditi pertanian serta bantuan pakan dan aneka benih ternak. Sementara dari sisi perikanan, pemberian bantuan sarana perikanan tangkap maupun air payau/tambak seperti motor tempel perahu penangkap ikan, bantuan pukat, benih ikan air payau dan lain-lainnya juga gencar dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Belu;
2. Kebijakan nasional Program Indonesia Pintar yang dimulai pada November 2014 yang ditujukan bagi keluarga miskin dan rentan miskin yang ingin menyekolahkan anaknya secara gratis. Program ini diharapkan mampu menjangkau anak-anak yang berada di luar sekolah misalnya anak jalanan, dan anak putus sekolah, yatim piatu, dan difabel. Kartu ini juga berlaku untuk balai-balai latihan kerja, agar dapat menjangkau anak-anak yang tidak mendapatkan pendidikan formal;
3. Intervensi program nasional PNPM Mandiri yang diselenggarakan sejak tahun 2007 hingga tahun 2014 PNPM Mandiri menjadi program yang melekat di hati rakyat dan dinilai berhasil memberdayakan masyarakat. PNPM dirasakan meningkatkan kesejahteraan;

4. Kebijakan Nasional Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN-KIS) dimulai pada November 2014 yang bertujuan untuk meringankan beban masyarakat miskin terhadap kesehatan;
5. Kebijakan nasional program Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) yang dimulai pada November 2014 dengan tujuan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat yang kurang mampu;
6. Kebijakan nasional Program Keluarga Harapan (PKH), di masa itu program PKH diupayakan menjangkau masyarakat miskin untuk meningkatkan kesejahteraan dengan melibatkan partisipasi kelompok penerima manfaat dalam menjaga kesehatan dan menyekolahkan anak-anaknya.
7. Kebijakan nasional Bansos Beras Sejahtera (Rastra)/ Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dimulai pada April 2017, BPNT merupakan kelanjutan Program Keluarga Harapan (PKH) yang bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran Keluarga Penerima Manfaat melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan, memberikan bahan pangan dengan nutrisi yang lebih seimbang kepada KPM, memberikan bahan pangan dengan tepat sasaran dan tepat waktu. Serta memberikan lebih banyak pilihan kepada KPM dalam memenuhi kebutuhan pangan, dan mendorong pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Sementara Bansos Rastra diberikan berupa beras kualitas medium sebanyak 10kg/KPM setiap bulan;
8. Kebijakan nasional Dana Desa yang dimulai pada tahun 2015 diarahkan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, peningkatan kualitas hidup manusia, dan menanggulangi kemiskinan yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP)

Strategi jangka pendek lainnya juga mencakup program peningkatan keterampilan kerja melalui variasi pemberian bantuan sarana usaha meliputi otomotif, perbengkelan, meubeler, kerajinan tenun ikat, menjahit, pengolahan pangan industri kecil rumah tangga dan lain-lainnya. Program pemberdayaan kewirausahaan masyarakat mikro kecil usaha dan menengah melalui pemberian bantuan modal usaha kepada kelompok usaha mikro, menciptakan kesempatan kerja dan lain-lainnya yang secara berkelanjutan (*sustainable*) dilakukan setiap tahun melalui program kerja perangkat daerah terkait. *Kedua*, strategi jangka panjang dengan menumbuhkan swadaya setempat melalui program-program pembangunan fisik maupun non fisik serta dengan memperbaiki dan memenuhi harkat hidup secara individual dan sosial yang bermartabat. Strategi jangka panjang melalui pembangunan fisik antara lain:

- Pembangunan dan pengembangan bandar udara komersial A. A. Bere Tallo Haliwen dengan tujuan selain untuk memperlancar arus transportasi murni melainkan untuk membuka akses bisnis yang memicu pertumbuhan ekonomi daerah;
- Pengembangan dan optimalisasi armada tol laut yakni pelabuhan laut Atapupu sebagai sarana penunjang arus mobilisasi perdagangan domestik ke wilayah Kabupaten Belu;
- Pembangunan pelabuhan penyebrangan penumpang Dermaga Teluk Gurita yang menghubungkan Pulau Timor dengan Pulau Alor dan sekitarnya dengan tujuan selain untuk kepentingan transportasi melainkan juga untuk tujuan peningkatan ekonomi lintas daerah/regional;
- Pembangunan dan rehabilitasi bendungan dan embung pertanian/peternakan guna mengatasi dan menjamin ketersediaan sumber air bagi masyarakat dan petani maupun peternak yakni Bendungan Rotiklot, Embung Haekrit, Embung Sirani dan masih

banyak lagi embung kecil yang telah dibangun tersebar di 12 kecamatan;

- Pengembangan kawasan strategis kabupaten sebagai kawasan yang dinilai sangat strategis secara ekonomi yang didukung oleh potensi sektor unggulan dan karakteristik wilayah meliputi: Kawasan agropolitan yang diarahkan di kawasan agropolitan Haekesak yang terdapat di Kecamatan Raihat dan Raimanuk; Kawasan minapolitan yang diarahkan di kawasan minapolitan perikanan budidaya di Kecamatan Kakuluk Mesak dan Kecamatan Tasifeto Timur; Kawasan usaha peternakan diarahkan di kawasan usaha peternakan Sonis Laloran di Kecamatan Tasifeto Barat; dan Kawasan wisata bahari pantai utara meliputi pantai di Kecamatan Kakuluk Mesak dan Kecamatan Tasifeto Timur;
- Pembangunan dan rehabilitasi daerah irigasi pertanian sebanyak 24 unit lokasi dengan luasan total sebesar 1243 ha yang tersebar sebanyaknya di 8 kecamatan dengan tujuan menunjang produktivitas berbagai komoditi pertanian plus peternakan;
- Pengembangan kawasan demplot pertanian dan kawasan pertanian *food estate* pada beberapa lokasi dengan ditunjang dengan penyediaan banyak sumur bor air tanah dan berbagai peralatan sistem pertanian;
- Pengembangan kawasan pariwisata melalui peningkatan sarana wisata untuk memberi dampak afinitas atau daya tarik wisatawan menikmati kawasan wisata yakni kawasan wisata bahari meliputi Pantai Pasir Putih, Pantai Sukaer Laran, Pantai Aufuik, Teluk Gurita, Dan Pantai Berluli. Wisata alam meliputi Kawasan Padang Sabana Fulan Fehan, Wisata Air Tejun Siata Mauhalek, Cagar Alam Benteng Tujuh Lapis Makes, maupun kolaborasi wisata bahari wisata dan wisata religi yakni objek wisata patung Bunda Maria

Teluk Gurita. Kesemuanya memberikan kontribusi bagi perekonomian lokal setempat maupun daerah skala kabupaten;

- Menjalin hubungan kerja sama bilateral perdagangan dengan pemerintah Republik Democratic Timor Leste.

Sedangkan strategi jangka panjang melalui pembangunan non fisik antara lain:

- Gerakan pemberdayaan melalui pembangunan sumber daya manusia untuk meningkatkan kualitas SDM masyarakat Kabupaten Belu seperti penyuluhan dan pembekalan keterampilan *softskill* maupun *hardskill* tentang cara mengelola berbagai usaha meliputi bidang pertanian, peternakan, perikanan, otomotif, perbengkelan, meubeler, kerajinan tenun ikat, menjahit, pengolahan pangan industri kecil rumah tangga dan lain-lainnya;
- Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan kewirausahaan kepada masyarakat;
- Pembaharuan gizi anak bayi dan balita sejak dini dengan tujuan memberikan asupan gizi seimbang sehingga berdampak pada kesehatan badan dan otak yang generasi yang pintar sehingga mampu memberikan perubahan baik di masa depan.

3.1.4. Analisis Faktor Pendorong Kinerja Indikator Angka Harapan Hidup (AHH)

Angka harapan hidup ditetapkan sebagai indikator penentu rata-rata usia hidup manusia. Dengan angka harapan hidup, kita dapat mengetahui secara jelas seberapa panjang usia hidup manusia secara umum pada suatu daerah atau wilayah di mana saja. Setiap daerah tentunya memiliki status rata-rata usia lama hidup manusia yang berbeda-beda. Setiap daerah dengan karakteristik sosial, budaya serta perilaku hidup yang hampir tidak sama dan cenderung berbeda sangat menentukan lama tidaknya hidup manusia di daerah tersebut. Secara

teoritis ada beberapa faktor yang mempengaruhi usia harapan hidup manusia yakni pola hidup yang lebih baik dan sehat, pencegahan serta perawatan ibu dan anak secara baik dan meningkatnya pendidikan dan pendapatan perkapita.

Catatan realisasi capaian target angka harapan hidup manusia kabupaten Belu pada dua periode akhir RPJPD menunjukkan terjadinya peningkatan. Pada periode ketiga RPJPD manusia Kabupaten Belu menempati angka 64,89 tahun dari yang ditargetkan di usia 68,30 tahun. Kondisi ini menunjukkan bahwa kinerja belum mencapai target karena masih selisih 3,41 tahun yang untuk mencapai target.

Sementara pada periode terakhir RPJPD tahun 2020-2024 realisasi AHH manusia Kabupaten Belu mencapai angka 65,28 tahun meningkat 0,39 tahun saja dari capaian pada periode ketiga RPJPD. Walaupun secara hitungan capaian target indikator RPJPD masih belum mencapai target di angka 70,69 tahun di akhir tahun 2024, usia lama hidup manusia Kabupaten Belu telah meningkat 0,88 tahun dari tahun awal perencanaan tahun 2005 di angka 64,30 tahun. Sehingga secara periodik AHH manusia Kabupaten Belu meningkat setiap pada periode RPJPD.

Peningkatan angka harapan hidup yang tidak terlalu signifikan ini setidaknya diestimasi disebabkan oleh faktor perilaku pola hidup sehat (PHBS) oleh masyarakat Kabupaten Belu. Data capaian kinerja tentang perilaku pola hidup sehat di Kabupaten Belu tahun 2022 meliputi rumah tangga ber-PHBS mencapai 81,70% dan sekolah ber-PHBS mencapai 78,15%. Data ini mengindikasikan bahwa sebagian besar masyarakat sadar akan pentingnya penerapan PHBS bagi kesehatan.

Sementara dari aspek kesehatan ibu dan anak yang tidak terkontrol secara baik menimbulkan terjadinya kasus kematian pada ibu dan anak. Kasus kematian ibu pada tahun 2019 sebanyak 5 kejadian meningkat drastis pada tahun 2020 sebanyak 12 kejadian namun pada tahun 2022 kasus menurun menjadi 6 kejadian. Hal ini menunjukkan jumlah kasus kematian ibu menurun. Kemudian meninjau pada kasus kematian bayi

dan balita secara berturut-turut pada tahun 2019 terjadi sebanyak 80 kejadian dan 14 kejadian. Namun pada tahun 2022 akhir periode RPJPD kasus kematian bayi dan balita menurun drastis secara berturut-turut menjadi 48 kejadian dan 4 kejadian saja. Penurunan ini secara langsung berpengaruh pada sedikitnya menaikkan AHH manusia di Kabupaten Belu.

Pencapaian ini tidak serta merta terjadi tanpa adanya dukungan kebijakan fiskal daerah bidang kesehatan yang dianggarkan melalui dinas kesehatan Kabupaten Belu untuk meningkatkan derajat kesehatan seluruh masyarakat. Ketersediaan anggaran bidang kesehatan di Kabupaten Belu cukup memadai dan selalu meningkat dari tahun ke tahun. Didukung pula dengan program kesehatan gratis bagi seluruh masyarakat Kabupaten Belu atas inisiasi kepala daerah periode 2021-2026, masyarakat miskin menengah ke bawah hanya dengan menggunakan KTP saja sudah bisa mengakses pelayanan kesehatan secara maksimal di seluruh fasilitas kesehatan.

Tabel.3.5. Realisasi APBD Bidang Kesehatan Kabupaten Belu Tahun 2020-2022

NO	TAHUN	TOTAL ANGGARAN APBD (Rp)	TOTAL ANGGARAN KESEHATAN (Rp)	APBD UNTUK KESEHATAN	REALISASI	
				%	(Rp)	%
1	2020	1.098.859.545.237,00	92,507,030,146	8,42	92.482.360.146,00	99,97
2	2021	907.555.497.669,00	100.406.699.721,00	11,06	100.199.619.721,00	99,79
3	2022	950,345,679,789.00	119,745,659,411.00	12,6	119,218,778,509,59	99,56

Sumber: Profil Kesehatan Kab. Belu 2023.

Maka dengan pengelolaan ketersediaan anggaran kesehatan yang memadai ini mampu menunjang Dinas Kesehatan mewujudkan kualitas kesehatan seluruh masyarakat Kabupaten Belu dan sekitarnya secara baik.

Ditinjau dari aspek pendidikan sebagai penunjang tingkat pengetahuan masyarakat Kabupaten Belu yang turut berpengaruh pada meningkatnya AHH adalah angka partisipasi murni dan angka partisipasi kasar pada setiap jenjang pendidikan. Apabila semakin banyak APM dan APH maka semakin banyak orang yang memahami pentingnya menjaga kesehatan melalui gerakan PHBS yang diselenggarakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Belu setiap tahun.

Tabel.3.6. Pertumbuhan APM dan APK Setiap Jenjang Pendidikan Di Kabupaten Belu Tahun 2020-2021

Jenjang Pendidikan Educational Level	Angka Partisipasi Murni (APM) Net Participation Rates		Angka Partisipasi Kasar (APK) Gross Participation Rates	
	2020	2021	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
SD/MI/Sederajat Primary School	96,29	96,03	119,14	118,09
SMP/MTs/ Sederajat Lower Secondary School	63,47	63,72	73,17	79,74
SMA/SMK/MA/Sederajat Upper Secondary School	54,76	53,84	72,77	70,58
Perguruan Tinggi/Sederajat University	---	6,82	---	8,53

Sumber: Belu Dalam Angka 2022

Dengan asumsi bahwa semakin banyak APM dan APH semakin baik nilai PHBS maka data *time series* APM dan APH setiap jenjang pendidikan sebagaimana terfigur pada tabel 3.3 di atas yang selalu meningkat setiap tahun menunjukkan semakin banyak masyarakat yang menerapkan PHBS dalam kehidupan sehari-hari sebagaimana yang selalu dikampanyekan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Belu. Atas peran strategis Dinas Kesehatan dalam mempromosikan PHBS maka capaian kinerja tentang perilaku pola hidup sehat di Kabupaten Belu meningkat dimana tahun 2022 rumah tangga ber-PHBS mencapai 81,70% dan sekolah ber-PHBS mencapai 78,15%. Sehingga dapat disimpulkan tingkat pengetahuan masyarakat melalui pendekatan APM dan APK setiap jenjang pendidikan terhadap tingkat lama hidup manusia berbanding lurus atau linear.

Faktor lain yang diasumsikan mengintervensi naik turunnya angka harapan hidup manusia adalah tingkat kehidupan yang layak. Apabila setiap individu memiliki kehidupan yang layak secara ekonomi maka pengeluaran pembiayaan kesehatan pribadi juga turut meningkatkan derajat kesehatan dan berpengaruh langsung terhadap lamanya usia hidup. Tingkat kehidupan yang layak diukur dari besaran PDRB daerah, tingkat kemiskinan, pendapatan perkapita dan pengeluaran perkapita masyarakat. *Pertama*, PDRB perkapita Kabupaten Belu pada dua periode akhir RPJPD cenderung meningkat sejak tahun 2018 sampai dengan tahun 2022.

Tabel.3.7. Pertumbuhan PDRB ADHK Kabupaten Belu
Tahun 2018-2022

Time Series Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan				
2018	2019	2020	2021	2022
2,805,710,000	2,956,520,000	2,965,230,000	3,020,030,000	3,116,230,000

Sumber: Belu Dalam Angka 2023

Kedua, aspek tingkat kemiskinan masyarakat Kabupaten Belu pada setiap periode RPJPD cenderung menurun dari kondisi awal perencanaan tahun 2005 sebanyak 47,88% menurun drastis menjadi 14,84% saja di tahun 2022. *Ketiga*, kenaikan nilai PDRB ternyata dapat menurunkan angka kemiskinan serta secara makro meningkatkan nilai pendapatan perkapita masyarakat Kabupaten Belu. Menurunnya angka kemiskinan tersebut didukung oleh meningkatnya pendapatan perkapita masyarakat yang cenderung naik pada setiap periode RPJPD.

Tabel.3.8. Perkembangan Angka Kemiskinan dan Pendapatan Perkapita Kabupaten Belu per periode RPJPD Tahun 2005-2025

Uraian	Periode I RPJPD	Periode II RPJPD	Periode III RPJPD	Periode IV RPJPD
Perkembangan Angka Kemiskinan	17.47	14.24	15.54	14.48
Perkembangan Pendapatan Perkapita	4,112,875	11,193,571	13,080,398	13,892,763

Sumber: Data Olahan BP4D Kab Belu 2023.

3.2. Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja

3.2.1. Analisis Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja Indikator

Angka Harapan Hidup

Angka Harapan Hidup (AHH) merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk menilai derajat kesehatan penduduk. Angka harapan hidup dapat dipengaruhi oleh keadaan lingkungan, ketersediaan pangan, pendidikan, kebijakan pemerintah maupun perekonomian masyarakat dan sebagainya. Angka harapan hidup merupakan alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya dan meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya. Angka harapan hidup yang rendah di suatu daerah harus diikuti dengan program pembangunan kesehatan, dan program sosial lainnya termasuk kesehatan lingkungan, kecukupan gizi dan kalori termasuk program pemberantasan kemiskinan. Oleh karena itu indikator ini menjadi bagian penting dalam program kerja pemerintah pusat hingga daerah.

Kinerja pemerintah daerah Kabupaten Belu terhadap pencapaian target peningkatan angka harapan hidup sesuai dengan data capaian memang masih belum mencapai target yang diharapkan. Peningkatan pencapaian target indikator AHH ini meningkat tipis dan tidak signifikan. Pada periode 2015-2019 ditargetkan AHH pada angka 68,30 namun pencapaian masih di bawah target yakni hanya 64,35. Begitu pun pencapaian target pada periode 2020-2025 tepatnya di akhir tahun 2022

hanya berada pada angka 64,89 masih cukup jauh dari target AHH di angka 70,69 pada akhir periode RPJPD.

Rendahnya pencapaian target indikator AHH ini tentunya dipengaruhi oleh faktor-faktor penghambat kinerja pemerintah daerah Kabupaten Belu antara lain:

1. Perilaku Hidup Bersih dan Sehat

Perilaku hidup bersih dan sehat atau lazimnya di singkat PHBS adalah sebuah gerakan yang dilakukan dengan menjaga kebersihan serta kesehatan tubuh maupun lingkungan sekitar. Perilaku hidup sehat ini dapat diterapkan di mana saja, mulai dari rumah, sekolah, lingkungan kerja, hingga tempat umum. Tujuan PHBS adalah untuk meningkatkan kualitas hidup melalui kegiatan yang berlandaskan atas kesadaran diri sendiri. Selain menjaga kualitas hidup diri sendiri, PHBS juga bertujuan untuk melindungi kesehatan orang terdekat serta melestarikan lingkungan sekitar.

PHBS sejauh ini menjadi salah satu program unggulan di bidang kesehatan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Belu setiap tahun anggaran. Telah banyak anggaran yang diperuntukkan oleh pemerintah Kabupaten Belu melalui Dinas Kesehatan sebagai perangkat daerah yang menangani urusan kesehatan masyarakat. Dinas Kesehatan selalu melakukan tindakan promotif kepada seluruh masyarakat mengenai apa, bagaimana, manfaat dan dampak yang ditimbulkan apabila PHBS dilaksanakan secara sungguh-sungguh maupun tidak dilakukan oleh masyarakat. Promosi mengubah perilaku masyarakat mengenai manfaat cuci tangan pakai sabun sebelum dan sesudah melakukan aktivitas telah gencar dilakukan oleh Dinas Kesehatan setiap tahun anggaran. Walaupun demikian belum sepenuhnya seluruh masyarakat sadar akan pola hidup demikian sehingga mempengaruhi kondisi kesehatan dengan grafik menurun.

Kebiasaan dan perilaku masyarakat Kabupaten Belu pada umumnya sejauh pengamatan dan pengalaman empiris selama ini dapat diasumsikan belum sepenuhnya memenuhi kriteria pola hidup bersih dan sehat (PHBS). Gaya hidup dengan makan makanan bergizi dan minuman sehat. Masyarakat pada umumnya kurang memperhatikan kebutuhan gizi tubuh melalui konsumsi makanan sehat dengan gizi seimbang seperti karbohidrat, protein, vitamin, dan mineral. Serta kurang memberi perhatian pada kebersihan dan higienis agar terhindar dari kontaminasi virus maupun bakteri patogen pada makanan dan minuman sehari-hari. Ketersediaan dan kualitas pangan masyarakat yang masih jauh dari standar gizi. Di samping itu mayoritas para generasi muda produktif terutama kaum laki-laki dan sebagian kecil kaum hawa memiliki kebiasaan mengonsumsi minuman beralkohol secara berlebihan dan terus menerus di usia mudanya yang berpotensi menyebabkan kerentanan tubuh terhadap penyakit apapun. Sehingga kesehatan tubuh generasi muda mulai terdistorsi sejak usia dini.

Tidak semua penduduk di Kabupaten Belu melakukan aktivitas olahraga secara rutin setiap hari untuk kepentingan kesegaran tubuh dan kesehatan. Masyarakat cenderung apatis terhadap pentingnya olahraga secara rutin yang diketahui dapat menjaga kebugaran tubuh serta meningkatkan sistem imunitas yang turut mencegah berbagai macam serangan penyakit. Akibatnya menurut data kesehatan tentang tren penduduk usia produktif 15-59 tahun yang mendapatkan pelayanan kesehatan meningkat drastis di tahun 2022 sebesar 29621 jiwa atau 21% sementara jumlah di tahun 2020 hanya 2376 jiwa atau 2% dari penduduk usia produktif.

2. Fasilitas Kesehatan

Sebagai salah satu fasilitas publik pelayanan kesehatan, fasilitas kesehatan sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Urgensitasnya adalah menjadi suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah dan/atau masyarakat. Hipotesisnya adalah semakin banyak dan lengkap fasilitas kesehatan di suatu daerah semakin baik pula drajat kesehatan masyarakat di daerah tersebut.

Tabel 3.9. Jumlah Fasilitas Kesehatan di Kabupaten Belu Tahun 2023

No	Fasilitas Kesehatan	Jumlah
1	Rumah Sakit	4
2	Puskesmas	17
3	Puskesmas Pembantu	14
4	Poliklinik	11
5	Apotek	24

Sumber data: BPS Belu 2023.

Terlihat bahwa jumlah fasilitas kesehatan dalam bentuk bangunan di Kabupaten Belu cukup memadai untuk melakukan tindakan pelayanan kesehatan kepada seluruh penduduk dan masyarakat. Menurut Undang-undang nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit pada pasal 7 menerangkan bahwa fasilitas kesehatan harus memenuhi persyaratan lokasi, bangunan, prasarana, sumber daya manusia, kefarmasian, dan peralatan. Peralatan pada fasilitas kesehatan sebagai sarana yang digunakan dalam menunjang pelayanan kesehatan harus memiliki peralatan medik

dan non medik sesuai dengan kemampuan pelayanan medik yang ada serta peralatan-peralatan tersebut harus memiliki standarisasi perawatan medik dan non medik yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan. Kondisi eksisting ketersediaan peralatan sebagai sarana pelayanan kesehatan untuk berbagai jenis penyakit maupun peralatan non medis di semua fasilitas kesehatan di Kabupaten Belu belum sepenuhnya lengkap sesuai standar. Walaupun pada tahun 2023 ini Rumah Sakit Umum Daerah Atambua telah dilengkapi dengan peralatan medis yang modern untuk layanan jantung, layanan penyakit hati dan saluran cerna serta alat endoskopi satu-satunya di provinsi NTT namun belum memberikan dampak secara masif bagi peningkatan AHH di akhir periode RPJPD ini. Dampak positif akan ketersediaan peralatan modern tersebut akan dirasakan pada periode mendatang. Dengan masih adanya keterbatasan peralatan pelayanan kesehatan di semua fasilitas kesehatan tersebut dapat mempengaruhi kinerja pelayanan kesehatan oleh tenaga medis dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang pada akhirnya berdampak pada penurunan AHH di Kabupaten Belu.

3. PDRB Perkapita

PDRB perkapita secara normatif menentukan tingkat kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat di suatu daerah. Semakin tinggi PDRB perkapita semakin besar pendapatan perorangan maka semakin sejahtera penduduk di daerah. Setiap penduduk akan mampu membiayai segala kebutuhan sandang, pangan, papan, tersier termasuk kebutuhan untuk kepentingan kesehatan. Namun apabila pendapatan perkapita rendah maka dipastikan masyarakat di daerah tersebut tidak mampu membiayai kebutuhan hidup jasmani sehari-hari.

Rata-rata pendapatan perkapita masyarakat di Kabupaten Belu sejak tiga periode akhir RPJPD sebesar Rp.12,722,244,00. Apabila

dikonversi menjadi pendapatan perkapita perbulan maka rata-rata besaran pendapatan masyarakat Kabupaten Belu berkisar pada Rp.1,060,187,00 atau 2,36 USD/hari. Angka ini masih berada di bawah sekitar nilai upah minimum regional Kabupaten Belu 50% yakni sebesar Rp.2,123,994,00. Artinya bahwa dengan rendahnya pendapatan perkapita masyarakat Kabupaten Belu tersebut berpotensi pada lemahnya pemenuhan kebutuhan hidup yang layak termasuk pembiayaan untuk masalah kesehatan tubuh pribadi. Sehingga apabila masyarakat kurang mampu memenuhi biaya kesehatan maka drajat kesehatan secara makro menurun yang akan berdampak pada rendahnya usia harapan hidup.

4. Gizi Kurang

Gizi kurang (*underweight*) merupakan suatu keadaan kurang gizi yang disebabkan oleh konsumsi gizi yang tidak cukup sesuai kebutuhan dalam jangka waktu tertentu. Apabila tubuh tidak memperoleh asupan nutrisi yang cukup seperti asupan protein, vitamin, kalori hingga mineral maka berpotensi langsung terjadinya kurang gizi. Efek dari kekurangan gizi tersebut akan menyebabkan tubuh kurus, *wasting* hingga *stunting*. Sehingga para pakar gizi berasumsi bahwa gizi kurang dapat berkembang menjadi gizi buruk yaitu keadaan kurang gizi yang berlangsung lama sehingga pemecahan cadangan lemak berlangsung terus-menerus dan dampaknya terhadap kesehatan anak akan menjadi semakin kompleks, terlebih lagi status gizi yang buruk dapat menyebabkan kematian.

Terhadap permasalahan kurang gizi bagi pemerintah Daerah Kabupaten Belu sejauh ini telah menempatkan perhatian serius. Berbagai upaya penanggulangan masalah kurang gizi yang secara linear berdampak timbulnya tubuh kurus, *wasting* hingga *stunting* bahkan kematian telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah

Kabupaten Belu. Kebijakan fiskal daerah yang diperuntukkan untuk penanggulangan masalah gizi kurang sejauh ini cukup memadai melalui Dinas Kesehatan sebagai perangkat daerah penanggung jawab.

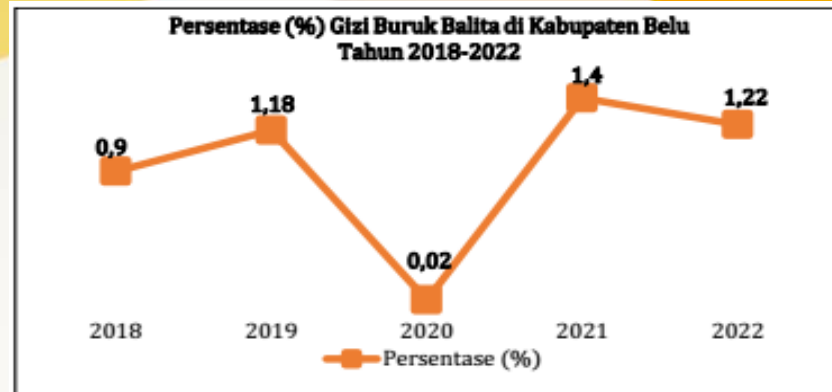
Upaya dan kerja keras Dinas Kesehatan dan masyarakat Kabupaten Belu dalam rangka pengurangan masalah kurang gizi menjadi 0% memang belum membuahkan hasil. Kesenjangan antara harapan dan realita selalu terjadi. Hasil pencapaian target selalu di luar ekspektasi dari arah kebijakan pembangunan kesehatan khususnya masalah kurang gizi masyarakat. Tren perkembangan problematika kurang gizi masyarakat Kabupaten Belu sejak lima tahun terakhir dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 yang dihipotesis sebagai salah satu faktor menghambat belum tercapainya target angka harapan hidup (*life expectancy*) dapat terlihat pada tabel dan grafik di bawah ini.

Tabel 3.10. Persentase Gizi Buruk Balita di Kabupaten Belu Tahun 2018-2022

Tahun	Persentase
2018	0.9
2019	1.18
2020	0.02
2021	1.4
2022	1.22

Sumber : Profil Daerah Kab. Belu Tahun 2023

Grafik 3.1. Persentase Gizi Buruk Balita di Kabupaten Belu Tahun 2018-2022



Sumber : Profil Daerah Kab. Belu Tahun 2023

Data di atas merupakan perkembangan data gizi buruk dimana gizi buruk sebagai akibat dari terjadinya masalah kurang gizi yang berlangsung lama secara berkelanjutan. Jumlah balita gizi buruk melonjak naik cukup tinggi di 1,22% pasca prevalensi kejadian di tahun 2018 yang hanya 0,9% saja. Dengan demikian jumlah angka atas kejadian gizi buruk sangat berkontribusi terhadap tidak tercapainya target lamanya harapan hidup manusia di Kabupaten Belu di akhir periode RPJPD tahun 2005-2025.

5. Keadaan Lingkungan

Hidup dengan lingkungan yang bersih dan sehat tentu memberi dampak positif pada hidup manusia. Secara tidak langsung lingkungan yang sehat akan menyehatkan jiwa dan raga. Lingkungan yang sehat adalah lingkungan yang bersih, dengan udara yang segar dan sedikit polusi udara. Lingkungan seperti ini tentu diinginkan semua orang tapi sulit diwujudkan. Hal itu dikarenakan manusia lalai menjaga kesehatan lingkungan. Oleh karena itu manusia harus menciptakan kondisi lingkungan yang mampu menopang keseimbangan ekologis yang dinamis antara

manusia dan lingkungan untuk mendukung tercapainya realitas hidup manusia yang sehat, sejahtera dan bahagia.

Pemerintah daerah Kabupaten Belu menggunakan alat ukur untuk mengetahui kualitas lingkungan sehat terdiri dari indeks kualitas udara, indeks kualitas air, indeks kualitas tutupan lahan dan jumlah sampah yang tertangani.

Tabel 3.11. Capaian Indikator Lingkungan Hidup di Kabupaten Belu Tahun 2016-2022

No	Uraian	CAPAIAN INDIKATOR						
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Indeks Kualitas Lingkungan	71.38	75.67	70.44	72.90	70.68	70.39	68.82
2	Indeks Kualitas Air	56.67	53.33	58.00	64.55	58.33	57.14	52.00
3	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	77.32	77.61	62.01	62.22	51.09	50.64	50.75
4	Indeks Kualitas Udara	78.17	95.41	94.12	95.50	92.75	93.36	94.19
5	Penanganan sampah Kabupaten Belu (%)	13.80	14.91	23.14	13.58	16.95	17.55	16.10

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kab. Belu Tahun 2023

Data menunjukkan bahwa kondisi kesehatan lingkungan secara umum di Kabupaten Belu masih jauh dari kategori kualitas kesehatan lingkungan ideal. Kualitas kesehatan lingkungan di Kabupaten Belu masih tergolong sedang belum mencapai tingkat maksimal. Kondisi demikian turut berkontribusi pada terganggunya kesehatan manusia yang juga secara langsung berdampak pada usia harapan hidup manusia di Kabupaten Belu.

3.2.2. Analisis Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja

Indikator Pertumbuhan Ekonomi Daerah

Pertumbuhan ekonomi adalah sebuah proses dari perubahan kondisi perekonomian yang terjadi di suatu negara atau daerah secara berkesinambungan untuk menuju keadaan yang dinilai lebih baik selama jangka waktu tertentu. Adanya peningkatan suatu perekonomian dalam bentuk produksi barang/jasa yang bersifat kuantitatif menunjukkan terjadinya pertumbuhan ekonomi. Peningkatan ekonomi suatu daerah

dipengaruhi oleh beberapa elemen meliputi sumber daya manusia, sumber daya alam, kemampuan IPTEK, tingkat inflasi dan tingkat suku bunga.

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Belu cenderung fluktuatif. Sejak periode pertama sampai dengan periode keempat RPJPD, pertumbuhan ekonomi berada dalam kondisi tidak stabil. Data menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi pada periode pertama berada di posisi 4,74%, meningkat menjadi 5,74% di akhir periode kedua kemudian menurun tipis di angka 5,38% pada akhir periode ketiga. Situasi semakin memburuk ketika memasuki tahapan periode akhir RPJPD tahun 2020-2025, pertumbuhan ekonomi menurun drastis dari 5,38% di periode ketiga ke 3,19% di akhir tahun 2022.

Tentunya penurunan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Belu ini tidak terjadi begitu saja. Ada banyak faktor yang menjadi penentu menurunnya tingkat ekonomi tersebut. Dari aspek pendapatan domestik regional bruto (PDRB) atas dasar harga konstan, terdapat 17 indikator penentu utama perhitungan pertumbuhan perekonomian daerah Kabupaten Belu. Dari sajian data perkembangan indikator PDRB tersebut dapat diketahui secara jelas mengapa pertumbuhan ekonomi menurun sebagaimana tergambar dalam tabel 3.12 di bawah ini.

Tabel 3.12. Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Kabupaten Belu Menurut Lapangan Usaha (persen) Tahun 2018-2022

Lapangan Usaha/Industry		2018	2019	2020	2021*	2022**
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan/ Agriculture, Forestry and Fishing	4,34	4,24	0,41	2,81	4,96
B	Pertambangan dan Penggalian/Mining and Quarrying	-2,67	-2,35	-28,08	3,44	2,14
C	Industri Pengolahan/Manufacturing	4,84	4,56	-0,59	0,87	8,39
D	Pengadaan Listrik dan Gas/Electricity and Gas	12,70	0,66	16,46	5,19	2,08
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang/Water supply, Sewerage, Waste Management and Remediation Activities	7,47	4,27	4,68	9,86	5,34
F	Konstruksi/Construction	6,91	5,75	-3,71	5,23	-0,45
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor/Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles and Motorcycles	7,19	7,35	-0,14	4,63	6,49
H	Transportasi dan Pergudangan/Transportation and Storage	5,96	5,25	-0,52	3,28	4,78
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum/ Accommodation and Food Service Activities	12,28	7,14	-10,91	3,51	8,75
J	Informasi dan Komunikasi/Information and Communication	5,45	3,70	8,88	3,84	5,78
K	Jasa Keuangan dan Asuransi/Financial and Insurance Activities	2,83	3,09	8,76	2,30	1,40
L	Real Estat/Real Estate Activities	4,91	0,17	-0,86	2,21	5,25
M,N	Jasa Perusahaan/Business Activities	4,04	5,46	-19,94	-14,54	4,38
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib/Public Administration and Defence; Compulsory Social Security	7,67	8,54	4,44	-0,99	0,70
P	Jasa Pendidikan/Education	5,82	5,53	1,58	-2,15	0,78
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial/Human Health and Social Work Activities	8,58	8,33	6,47	7,66	2,20
R,S,T,U	Jasa lainnya/Other Services Activities	7,44	8,27	-11,91	-7,13	2,74
Produk Domestik Regional Bruto/Gross Regional Domestic Product		5,60	5,38	0,40	1,75	3,19

Sumber Data: BDA Kab. Belu 2022

Dari tabel 3.12 di atas memberikan data dukung akan menurunnya pertumbuhan ekonomi Kabupaten Belu. Pada tabel 3.11 terlihat bahwa sejak lima tahun terakhir pertumbuhan ekonomi menurun sangat tajam dibandingkan dengan kondisi tahun 2018. Diperkuat lagi dengan data pertumbuhan sektor PDRB pada tabel 3.12, pada tahun 2022 kontribusi sektor-sektor ekonomi menurun drastis pada sembilan sektor meliputi

sektor konstruksi, perdagangan besar/eceran, transportasi, jasa keuangan dan asuransi, jasa perusahaan, administrasi pemerintahan, jasa pendidikan, jasa kesehatan dan jasa lainnya. Sementara sebelas sektor vital lainnya hanya mengalami kenaikan yang relatif kecil jika dibandingkan dengan kondisi riil pada tahun 2019.

Disinyalir bahwa penurunan drastis pada tahun 2020 dan tahun 2021 disebabkan oleh gejolak pandemi covid19 secara global. Efek pandemi covid19 menghancurkan sendi-sendi perekonomian negara hingga pada semua lapisan masyarakat. Aktivitas perekonomian makro maupun mikro tidak berjalan normal menyebabkan pendapatan masyarakat berkurang bahkan kehilangan pendapatan oleh karena pemerintah mengeluarkan kebijakan *physical distancing* selama 2 tahun berturut-turut agar melindungi masyarakat dari serangan covid19. Kebijakan anggaran melalui APBN dan APBD diarahkan kepada upaya penanggulangan pandemi covid19 dengan porsi yang sangat besar. *Refocusing* APBD Kabupaten Belu terjadi secara masif untuk menantang badai covid19 pada tahun 2020 dan tahun 2021 serta melakukan pemulihan ekonomi melalui program bantuan langsung tunai dampak covid19 kepada seluruh lapisan masyarakat terkategori lemah secara ekonomi serta para pelaku usaha kecil menengah. Sehingga kondisi mulai sedikit membaik di tahun 2022 dengan tingkat pertumbuhan perekonomian daerah berada pada angka 3,19%.

Dampak pandemi covid19 pada akhirnya berdampak buruk pada rendahnya kontribusi semua sektor PDRB terhadap pertumbuhan ekonomi daerah Kabupaten Belu. Beberapa sektor pamungkas yang menjadi unggulan seperti pertanian, kehutanan, dan perikanan di tahun 2022 hanya menyumbang 4,96%, sektor perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor hanya menyumbang 6,49%, sektor penyediaan akomodasi dan makan minum hanya mampu 8,75%, jasa perusahaan 4,38% dan sektor jasa transportasi dan pergudangan hanya mampu menyumbang 4,78% saja.

Menurunnya pertumbuhan ekonomi juga dipengaruhi oleh rendahnya pemanfaatan sumber daya alam yang tersedia. Masyarakat Kabupaten Belu pada umumnya lemah dalam melihat sumber daya alam yang tersedia sebagai potensi peningkatan taraf hidup menuju kemakmuran. Hal ini terlihat pada sumbangan sektor pertanian, perikanan dan kehutanan terhadap PDRB masih di bawah 5%. Masih banyak lahan yang terlantar tidak dimanfaatkan oleh masyarakat kabupaten Belu. Masih tersedia 105175,86 m² lahan kering yang belum optimal pemanfaatannya serta terdapat sekitar 30773 m² lahan kering yang sama sekali tidak dimanfaatkan sebagai lahan pertanian dan perkebunan (BDA 2022). Oleh karenanya produksi berbagai komoditi pertanian dan perkebunan cukup rendah. Komoditi unggulan Kabupaten Belu seperti cabai, bawang merah, bawang putih, tomat, kacang-kacangan, padi sawah dan jagung masih bergerak dalam ranah pemenuhan kebutuhan internal daerah dan selalu fluktuatif produksinya. Produksi komoditi unggulan belum mampu bersaing dalam bursa *export* ke luar daerah.

3.2.3. Analisis Faktor Penghambat Capaian Indikator Pendapatan Perkapita Atas Dasar Harga Konstan

Catatan realisasi capaian pendapatan perkapita Kabupaten Belu menunjukkan terjadi peningkatan pada setiap periode RPJPD. Namun peningkatan tersebut jika dilihat dari data capaian target per periode RPJPD, pendapatan perkapita hanya terjadi dari di periode kedua dari capaian pada pertama RPJPD. Sementara pada periode ketiga RPJPD dan periode keempat RPJPD pencapaian selalu di bawah target yang direncanakan. Artinya dengan tidak tercapainya target yang direncanakan maka dipastikan ada hal-hal yang turut berkontribusi terhadap ketidaktercapaian itu oleh pemerintah daerah Kabupaten Belu pada dua periode terakhir RPJPD.

Secara teoritis, pendapatan perkapita atas dasar harga konstan dipengaruhi oleh besaran pendapatan domestik regional bruto harga konstan dan jumlah penduduk di daerah pada tahun tertentu. Sehingga sumbangan indikator-indikator PDRB tersebut menjadi penentu naik tidaknya pendapatan perkapita masyarakat Kabupaten Belu secara makro yang pada akhirnya menentukan tingkat ekonomi Kabupaten Belu. Semakin besar kontribusi masing-masing sektor pendapatan domestik regional bruto daerah dengan pertumbuhan penduduk yang kecil maka pendapatan perkapita masyarakat akan besar. Tetapi apabila kontribusi masing-masing sektor pendapatan domestik regional bruto daerah kecil dengan jumlah penduduk yang banyak maka jumlah pendapatan masyarakat pun akan kecil.

Tabel 3.13. Pertumbuhan PDRB ADHK pada Dua Periode akhir RPJPD Kabupaten Belu

Lapangan Usaha	Kondisi Akhir Periode III RPJPD Tahun 2019 (%)	Kondisi Akhir Periode IV RPJPD Tahun 2022 (%)	Pertumbuhan Sektor PDRH AHDK pada Dua Periode Akhir RPJPD (%)
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	4.24	4.96	0.72
Pertambangan dan Penggalan	-2.35	2.14	4.49
Industri Pengolahan	4.56	8.39	3.83
Pengadaan Listrik dan Gas	0.66	2.08	1.42
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	4.27	5.34	1.07
Konstruksi	5.75	-0.45	-6.2
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	7.35	6.49	-0.86
Transportasi dan Perdagangan	5.25	4.78	-0.47
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	7.14	8.75	1.61
Informasi dan Komunikasi	3.70	5.78	2.08
Jasa Keuangan dan Asuransi	3.09	1.40	-1.69
Real Estate	0.17	5.25	5.08
Jasa Perusahaan	5.46	4.38	-1.08
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	8.54	0.70	-7.84
Jasa Pendidikan	5.53	0.78	-4.75
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	8.33	2.20	-6.13
Jasa Lainnya	8.27	2.74	-5.53
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	5.38	3.19	-2.19

Sumber: Data Olahan BP4D Belu 2023.

Data pada tabel 3.13 di atas secara garis besar menggambarkan alasan mengapa pendapatan perkapita Kabupaten Belu pada dua periode

akhir RPJPD tidak mencapai target yang direncanakan. Secara keseluruhan kondisi PDRB mengalami kenaikan yang kecil sementara jumlah penduduk di tahun 2022 terus bertambah 4190 jiwa sejak tahun 2019. Pergerakan tujuh belas sektor ekonomi PDRB kurang progresif untuk mendongkrak naiknya PDRB perkapita yang besar. Artinya bahwa perlakuan masyarakat Kabupaten Belu terhadap aktivitas ekonomi masih bersifat *business as usual* atau datar-datar saja belum berada pada ranah orientasi bisnis sebagai investasi jangka panjang. Semangat masyarakat untuk mengonversi aset yang tidak produktif menjadi produktif bernilai ekonomis yang tinggi masih lemah. Di samping itu pula pola pikir atau *mindset* masyarakat pada umumnya terutama masyarakat desa dalam urusan ekonomi individual maupun keluarga masih bersifat konsumtif jangka pendek di tengah kepemilikan aset berupa lahan pertanian yang luas. Faktor kultural tersebut secara nyata mendorong maju mundurnya tingkat pendapatan perkapita masyarakat Kabupaten Belu.

Di lain pihak, perlakuan pemerintah daerah Kabupaten Belu melalui arah kebijakan pembangunan belum secara optimal melalui strategi investasi lokal maupun investasi dari luar oleh investor yang masuk ke Belu untuk memperbaiki tingkat pendapatan perkapita masyarakat yang lebih baik.

3.2.4. Analisis Faktor Penghambat Capaian Indikator Angka Kemiskinan

Perkembangan tingkat kemiskinan di daerah Kabupaten Belu pada setiap periode RPJPD tahun 2005 hingga tahun 2022 menunjukkan kemajuan yang luar biasa baik. Jumlah penduduk miskin berkurang secara drastis dari 47,88% pada tahun 2005 menjadi 14,84% di akhir tahun 2022 atau terjadi penurunan 33,04%. Ini merupakan sebuah pencapaian yang cukup progresif dalam pengentasan kemiskinan. Walaupun demikian progresifnya keberhasilan pencapaian tersebut, realitas menunjukkan bahwa gerakan penurunan tingkat kemiskinan

oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Belu masih jauh dari target yang direncanakan dalam RPJPD. Target penurunan angka kemiskinan di akhir periode RPJPD optimis pada angka 9,13% sementara pencapaian baru mencapai 14,84% atau masih 5,71% yang perlu diturunkan sehingga *top target* dapat dicapai.

Tabel 3.14. Garis Kemiskinan Kabupaten Belu Tahun 2014-2022 Menurut Standar Bank Dunia

No	Tahun Realisasi	Jumlah Penduduk Miskin (Jiwa)	Persentase Penduduk Miskin (%)	Garis Kemiskinan per bulan (Rp)	Garis Kemiskinan per hari (Rp)	Garis Kemiskinan per hari (Dollar)
1	2014	54450	14.24	263,659	8,789	\$0.71
2	2015	34750	16.81	279,442	9,315	\$0.68
3	2016	33130	15.82	300,914	10,030	\$0.75
4	2017	33950	15.95	319,280	10,643	\$0.79
5	2018	33910	15.7	330,944	11,031	\$0.76
6	2019	34080	15.54	349,414	11,647	\$0.84
7	2020	34180	15.37	372,087	12,403	\$0.88
8	2021	35410	15.68	379,280	12,643	\$0.89
9	2022	33980	14.84	416,519	13,884	\$0.88

Sumber: Olahan Data BDA 2023.

Untuk menggapai atau mewujudkan tercapainya rencana sebagaimana target yang telah dirumuskan tidak semudah membalikkan telapak tangan. Dalam realitas pencapaiannya ditemui berbagai peristiwa antagonis yang menghambat program kerja pembangunan tertuju. Peristiwa antagonis tersebut menjadi faktor yang berpotensi menghambat daerah dalam mewujudkan cita-cita dimaksud. Sehingga terhadap belum tercapainya penurunan angka kemiskinan sebagaimana yang ditargetrencanakan, ada beberapa *figure* yang menjadi penghambat peningkatan taraf hidup masyarakat Kabupaten Belu antara lain:

1. Kurangnya Lapangan Pekerjaan yang tersedia di tengah jumlah pencari kerja yang terus meningkat setiap tahun;

2. Masih rendahnya jiwa dan semangat berwira-usaha sehingga kurang mampu melihat potensi yang tersedia menjadi peluang ekonomi produktif;
3. Masyarakat usia produktif terkesan berada dalam belenggu lingkaran “Malas Bekerja”. Sebagian masyarakat usia produktif lebih rajin bekerja di daerah lain atau bermigrasi sementara lahan kering maupun basah masih luas tidak diolah/dikonversi menjadi nilai uang yang diterlantarkan begitu saja;
4. Harga Kebutuhan Tinggi sementara pendapatan perkapita masyarakat masih rendah di bawah besaran pengeluaran;
5. Masyarakat masih mengalami keterbatasan sumber daya modal untuk memulai usaha produktif baik mikro maupun menengah.
6. Tradisi budaya masyarakat yang sangat konsumtif dengan biaya yang tinggi seperti tradisi perkawinan sangat glamor di tengah kemampuan ekonomi rumah tangga/individual yang masih rendah, tradisi adat dan lain-lain.

3.2.5. Analisis Faktor Penghambat Capaian Indikator Tingkat

Pengangguran Terbuka

Pengangguran terbuka sering menjadi masalah dalam perekonomian karena dengan adanya pengangguran, produktivitas dan pendapatan masyarakat akan berkurang sehingga dapat menyebabkan kemiskinan dan masalah sosial lainnya. Pengangguran terbuka umumnya disebabkan karena jumlah para pencari kerja tidak sebanding dengan jumlah lapangan kerja yang ada. Oleh karenanya upaya penanggulangan masalah pengangguran terbuka selalu menjadi konsentrasi kebijakan pemerintah.

Secara teoritis pengangguran terbuka terdiri dari orang yang tidak mempunyai pekerjaan dan mencari pekerjaan. Orang yang tidak mempunyai pekerjaan dan mempersiapkan usaha. Orang yang tidak

punya pekerjaan dan tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan. Jumlah penduduk yang besar pada suatu daerah berimplikasi pada jumlah angkatan kerjanya yang juga besar serta berpotensi memproduksi jumlah pengangguran yang besar pula.

Berbagai upaya dan langkah strategis pemerintah Kabupaten Belu dalam rangka pengurangan angka pengangguran terbuka telah dilakukan melalui program kegiatan terkait. Pemberdayaan masyarakat melalui peningkatan keterampilan kerja pada berbagai sektor kerja, program kegiatan penciptaan iklim kerja produktif, penyelenggaraan balai latihan kerja dengan tujuan mempersiapkan calon pencari kerja yang *applicable* dalam dunia kerja.

Capaian kinerja pemerintah daerah Kabupaten Belu terhadap indikator tingkat pengangguran terbuka cenderung menurun dimana jumlah angka pengangguran terbuka meningkat setiap periode RPJPD. Pada dua periode akhir RPJPD, pengangguran terbuka meningkat dari 4,63% pada periode ketiga RPJPD menjadi 6% pada periode akhir RPJPD tepatnya pada akhir tahun 2022. Kondisi ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Belu mengalami kesulitan dalam mengatasi permasalahan pengangguran terbuka di masyarakat.

Pandemi covid19 baru mulai mereda di akhir tahun 2021 namun menyisakan dampak buruk bagi kehidupan manusia saat itu. Meningkatnya jumlah pengangguran di tahun 2020 hingga tahun 2022 merupakan efek terpuruk akibat pandemi covid19. Kebijakan pemerintah melakukan aksi masif *physical distancing* atau pembatasan sosial berskala besar (PSBB) kepada seluruh masyarakat tanpa terkecuali sampai dengan batas waktu yang tidak ditentukan saat itu menyebabkan menurunnya aktivitas ekonomi, penurunan jumlah produksi barang dan jasa yang berimbas pada bertambahnya angka pengangguran. Banyak

perusahaan swasta mengalami kerugian besar akibat jumlah barang produksi yang tinggi sementara permintaan sangat rendah sehingga terjadi pemutusan hubungan kerja terhadap karyawan secara masif. Di samping itu juga jumlah *output* mahasiswa dari Kabupaten Belu yang telah lulus dari berbagai universitas yang berpredikat sebagai calon pencari kerja sangat tinggi pada tahun 2020 hingga tahun 2022 bertepatan dengan dampak PSBB berpengaruh negatif dan signifikan terhadap jumlah pengangguran terbuka.

Menurunnya tingkat pertumbuhan ekonomi juga mendukung kenaikan jumlah pengangguran terbuka. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Belu sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 menurun drastis jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2019. Status pertumbuhan ekonomi pada tahun 2019 berada pada kondisi baik yakni 5,38% sementara pada tahun 2020 menurun tajam menjadi 0,4% saja kemudian sedikit meningkat menjadi 1,75% di tahun 2021. Proses pembenahan atau perbaikan kondisi perekonomian yang buruk mulai dilakukan setelah berakhirnya status pandemi covid19 oleh kebijakan pemerintah, kerja keras pihak swasta dan seluruh elemen masyarakat sehingga tingkat ekonomi Kabupaten Belu beranjak naik menjadi 3,19% di tahun 2022. Hal ini membuktikan bahwa semakin rendah pertumbuhan ekonomi maka semakin tinggi tingkat pengangguran pada suatu daerah.

BAB IV

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI TINDAK LANJUT

4.1. Kesimpulan

Pembangunan merupakan suatu proses untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat menjadi lebih baik dari sebelumnya baik secara fisik maupun non fisik. Derajat baiknya tidaknya taraf hidup masyarakat sangat ditentukan oleh derajat baik tidaknya pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Pelaksanaan penyelenggaraan pembangunan daerah jangka panjang di Kabupaten Belu telah berlangsung sejak tahun 2005 sampai dengan saat ini tahun 2023. Sejalan dengan itu telah banyak program pembangunan di segala aspek dilaksanakan pada setiap periode RPJPD Kabupaten Belu Tahun 2005-2025 dengan tujuan mewujudkan tujuan pembangunan daerah yakni suatu masyarakat adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila.

Beragam aspek pembangunan daerah meliputi aspek pendidikan, kesehatan, infrastruktur, sosial, budaya, ketenagakerjaan, transmigrasi, kepemudaan dan olahraga, perkoperasian, kependudukan, pertanian, perikanan, kepariwisataan, perdagangan dan industri, pertambangan, perijinan dan investasi daerah, keamanan dan ketertiban masyarakat hingga ke sektor politik dan lain-lainnya yang semuanya telah dikemas dalam rumusan indikator pembangunan jangka panjang daerah 2005-2025 telah dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Belu. Pencapaian indikator target pembangunan daerah tidak segampang membalikkan telapak tangan. Pemerintah daerah Kabupaten Belu telah menghadapi dan bergelut dengan berbagai hambatan, rintangan dan tantangan yang besar dalam upaya mencapai tujuan suci tersebut.

Hasil evaluasi terhadap RPJPD Kabupaten Belu tahun 2005-2025 menunjukkan adanya perubahan positif yang cukup signifikan baiknya.

Dengan upaya dan kerja keras yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Belu, pencapaian target RPJPD diuraikan sebagai berikut:

1. Indikator daerah indeks pembangunan manusia (IPM) mengalami peningkatan menjadi 63,23 pada tahun 2022 dari kondisi awal tahun 2005 di angka 61,22 tetapi belum mencapai target 71,90 di akhir periode RPJPD. Pertumbuhan baik ini didorong oleh adanya alokasi anggaran bidang kesehatan dan pendidikan yang besar, ketersediaan tenaga kesehatan dan tenaga pendidikan yang memadai serta pendapatan masyarakat yang relatif meningkat sehingga membawa masyarakat menuju standar hidup yang layak;
2. Indikator daerah angka harapan hidup (AHH) bertambah 0,98 tahun dari tahun awal perencanaan 64,30 di tahun 2005 menjadi 65,28 di tahun 2022 namun belum mencapai target 70,69 tahun di akhir periode RPJPD. Masih rendahnya AHH ini dipengaruhi oleh perilaku hidup masyarakat yang kurang memperhatikan aspek kebersihan dan kesehatan secara serius, pendapatan perkapita masyarakat yang masih rendah hanya 2,36 USD/hari sehingga sulit untuk membiayai kebutuhan kesehatan yang tinggi dan kebutuhan hidup sehari-hari, masih belum lengkapnya peralatan/sarana yang tersedia di setiap fasilitas kesehatan sesuai standar kementerian kesehatan, kondisi kurang gizi balita masih cukup tinggi dimana jumlah balita gizi buruk melonjak naik cukup tinggi di tahun 2022 sebanyak 1,22% pasca prevalensi kejadian di tahun 2018 yang hanya 0,9% saja, kondisi kualitas air masih dalam rendah walaupun dalam kategori sedang yakni hanya 52 poin saja dari poin maksimal 100 sehingga mengganggu kesehatan masyarakat Kabupaten Belu.
3. Indikator daerah laju pertumbuhan ekonomi mengalami penurunan dari 4,99% di tahun 2005 menjadi 3,19 di tahun 2022 sementara target akhir harus mencapai angka 7,77%. Menurunnya pertumbuhan ekonomi disebabkan oleh rendahnya masyarakat memanfaatkan sumber daya alam yang tersedia dan sektor-sektor

ekonomi pada masa awal mula hingga pasca pandemi covid19 di tahun 2022.

4. Indikator daerah pendapatan perkapita atas dasar harga konstan masyarakat cenderung meningkat pada setiap periode RPJPD hingga pada tahun 2022 mencapai Rp. 13,892,762,00 tetapi belum mencapai target sebesar Rp. 25,186,756,00 di akhir periode RPJPD. Kenaikan ini disebabkan oleh Intervensi program-program populis penanggulangan darurat ekonomi masyarakat berupa PKH, BLT, Program Jaring Pengaman Sosial;
5. Indikator daerah tingkat kemiskinan berhasil diturunkan jumlahnya dari 47,88% di tahun 2005 menjadi 14,84% di tahun 2022 tetapi belum mencapai target 9,13% di tahun 2025. Keberhasilan ini didorong oleh strategi dalam jangka pendek yaitu memindahkan berbagai sumber daya kepada kaum miskin dalam jumlah yang memadai dan strategi jangka panjang dengan menumbuhkan swadaya setempat melalui program-program pembangunan fisik maupun non fisik;
6. Pencapaian indikator daerah tingkat pengangguran terbuka (TPT) masih jauh dari harapan dimana jumlah angka pengangguran selalu meningkat pada tiga periode terakhir RPJPD dimana pada tahun 2022 berada pada angka 6% jauh dari target 1,8% di akhir periode RPJPD. Meningkatnya jumlah TPT disebabkan oleh dampak langsung dari fenomena pandemi covid19 dan kebijakan *physical distancing* oleh pemerintah saat itu sehingga terjadi penurunan aktivitas ekonomi, penurunan jumlah produksi barang dan jasa, pemutusan hubungan kerja masif serta lonjakan jumlah lulusan siswa dan mahasiswa calon pencari kerja dari berbagai tingkat pendidikan dalam jumlah yang besar dalam dua tahun masa pandemi covid19.

4.2. Rekomendasi Tindak Lanjut

1. Pada perencanaan pembangunan jangka panjang daerah selanjutnya pemerintah daerah Kabupaten Belu perlu merumuskan visi dan misi daerah yang bersinergi dengan visi misi RPJP nasional maupun RPJPD Provinsi NTT demi terwujudnya tujuan pembangunan nasional secara efektif;
2. Pemerintah daerah Kabupaten Belu perlu menetapkan rumusan indikator sasaran pencapaian setiap masing-masing misi daerah secara spesifik dan terukur pada perencanaan pembangunan jangka panjang daerah selanjutnya;
3. Pemerintah daerah Kabupaten Belu harus menentukan arah kebijakan pembangunan yang tepat untuk meningkatkan target capaian indikator makro yang menurun di akhir periode RPJPD Tahun 2005-2025;
4. Pada penetapan indikator target capaian daerah dalam RPJPD 2025-2045 harus diselaraskan dengan indikator makro nasional RPJPN 2025-2045 sehingga visi Indonesia Emas 2045 dapat terwujud.